

**RENCANA KERJA
TAHUN 2022**



**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KOTA SURABAYA**

DAFTAR ISI

Daftar Isi.....	1
Daftar Tabel	2
Daftar Gambar	3
BAB I. PENDAHULUAN	4
1.1. Latar Belakang.....	4
1.2. Landasan Hukum.....	13
1.3. Maksud dan Tujuan.....	16
1.4. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	18
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	18
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	28
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	32
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	35
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	64
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	69
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	69
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	70
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	72
4.1. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam penetapan program dan kegiatan.....	72
4.2. Garis besar rekapitulasi program dan kegiatan.....	73
4.3. Program dan Kegiatan	73
BAB V. PENUTUP	92

DAFTAR TABEL

Tabel T-C.29. Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021.....	23
Tabel T-C.30. Pencapaian Kinerja Pelayanan.....	30
Tabel T-C.31. Review Rancangan Awal RKPD Tahun 2022	49
Tabel T-C.33. Rumusan rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah tahun 2022 dan prakiraan maju tahun 2023.....	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah.....	10
Gambar 1.2	Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	11

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanahkan bagi seluruh OPD untuk menyusun rencana kerja tahun berikutnya sebagai dasar perencanaan kegiatan. Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya dilakukan dengan melaksanakan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi riil, evaluasi pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya. Dari hasil pengkajian dan evaluasi tersebut diharapkan agar dalam pelaksanaan kegiatan nantinya tidak terjadi kegagalan, sehingga Program dan Kegiatan yang telah direncanakan bisa berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah tahunan yang secara substansial menerjemahkan tujuan, sasaran, dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan dilaksanakan dalam bentuk Program dan Kegiatan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya.

1.1. Latar Belakang

1.1.1 Pengertian Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan petunjuk teknis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang dimaksud Renja PD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMN, RKP Pemerintah Pusat, RPJMD Provinsi, dan RPJPD Pemerintah kota.

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah guna mengetahui sejauh mana capaian kinerja Perangkat Daerah setiap tahun terhadap target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang disusun setiap lima 5 (lima) tahun.

Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya bertugas membentuk Keluarga berkualitas. Menurut UU No. 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan kedepan, bertanggung jawab, harmonis dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keluarga yang berdaya adalah keluarga yang mampu memanfaatkan semua potensi kekuatan yang ada di dalam dirinya dan di sekitarnya. Kekuatan itu dimanfaatkan untuk membuat mereka tidak bergantung kepada orang lain. Keluarga berdaya adalah keluarga yang memiliki perilaku hidup dan modal sosial yang positif, menyadari arti penting pendidikan, nilai hidup sehat, kepatuhan terhadap hukum, keharusan untuk terus bekerja atau berwirausaha serta menjaga kelestarian lingkungan. Keluarga berdaya adalah keluarga yang memahami kegunaan semangat kebersamaan dalam membangun keluarga yang bahagia. Untuk mewujudkan hal tersebut Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya menyusun Rencana Kerja Tahun 2022, yang akan digunakan sebagai dasar dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-PD).

1.1.2 Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Renja Perangkat Daerah disusun melalui tahapan yang terdiri dari:

1. Persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah
3. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah
5. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah
6. Penetapan Renja Perangkat Daerah

Persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah meliputi penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah, selanjutnya melakukan orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah, dilanjutkan dengan penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah serta menyiapkan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada hasil evaluasi renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Ranwal Renja PD disusun bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Evaluasi juga dilakukan dengan berpedoman pada hasil evaluasi hasil renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Rancangan awal Renja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika minimal sebagai berikut :

- a. Pendahuluan;
- b. Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
- c. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
- d. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
- e. Penutup.

Sesudah Ranwal Renja selesai disusun maka tahap berikutnya yaitu penyusunan Rancangan Renja OPD yang merupakan upaya untuk penyempurnaan renja yang disusun. Penyempurnaan mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada rancangan awal RKPD. Sedangkan rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan yang baru, diajukan kepala Perangkat Daerah kepada kepala Bappeko dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah dan disajikan dengan sistematika yang sama dengan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota disampaikan kepada Kepala Bappeko untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD. Bappeko melakukan verifikasi terhadap rancangan Renja Perangkat Daerah untuk menjamin rancangan Renja Perangkat Daerah sudah selaras dengan rancangan awal RKPD. Apabila berdasarkan hasil verifikasi ditemukan hal yang perlu disempurnakan, maka Bappeko menyampaikan saran dan rekomendasi

penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah. Berdasarkan saran dan rekomendasi penyempurnaan, Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Renja Perangkat Daerah. kemudian Rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan disampaikan kepada Kepala Bappeko untuk diverifikasi kembali paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan Renja Perangkat Daerah.

Setelah Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah dilaksanakan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Bappeko. Forum ini dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Pembahasan dengan pemangku kepentingan bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi maupun kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah. Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah surat edaran Kepala Daerah diterima. Hasil pembahasan dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dirumuskan menjadi berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.

Tahap selanjutnya adalah Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah. Tahap ini merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD. Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah disusun sesuai sistematika rancangan awal Renja Perangkat Daerah.

Tahap terakhir penyusunan Renja adalah Penetapan Renja Perangkat Daerah. Draft Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada kepala Bappeko untuk diverifikasi, paling lambat 1 (satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan. Verifikasi harus dapat menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif Renja Perangkat Daerah selaras dengan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD dan Renja Perangkat Daerah lainnya, serta menemukan hal yang perlu disempurnakan. Bappeko menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah dan berdasarkan

saran dan rekomendasi tersebut, Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah. Setelah disempurnakan rancangan akhir Renja disampaikan kembali kepada Kepala Bappeko, kemudian dilakukan Verifikasi lagi paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan akhir Renja Perangkat Daerah. Bappeko melalui Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan menjadi Perkada. Penetapan Renja Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

1.1.3 Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Dokumen Renja Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan lainnya, baik di tingkat pusat maupun daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga seharusnya Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) kota Surabaya. Pada Tahun 2021 merupakan tahun kelima RPJMD Kota Surabaya, sehingga dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah tahun 2022 Kota Surabaya belum memiliki RPJMD dan Renstra yang dapat dipedomani dalam penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022.

Penyusunan Perencanaan anggaran tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Saran tindak

Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

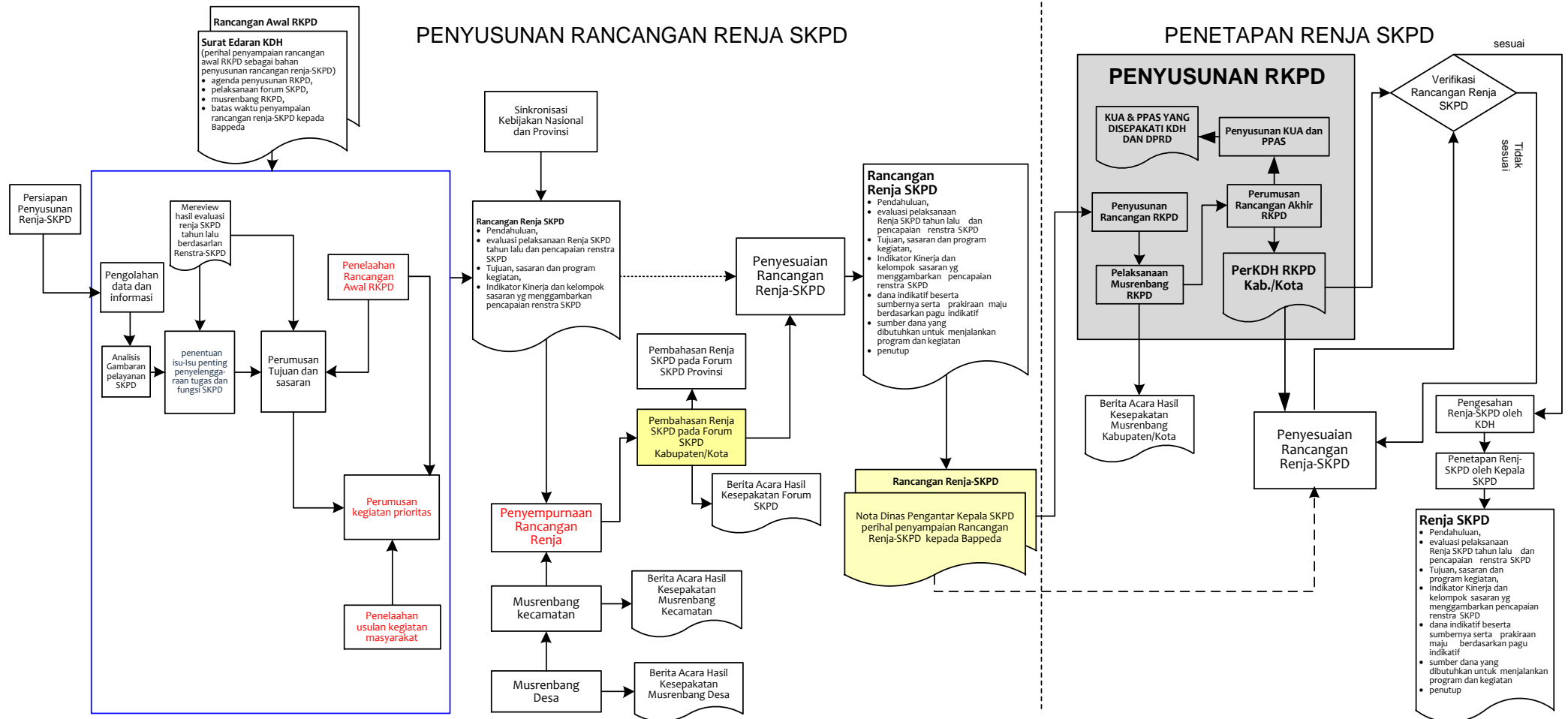
Untuk menyusun RPJMD Kota juga harus memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional dan mengacu pada RPJM Provinsi melalui penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten/kota dengan pembangunan provinsi dan prioritas pembangunan nasional. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional, merupakan pedoman untuk menyusun Renstra Kementerian/Lembaga serta dijabarkan menjadi Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, maka RKPD Kota Surabaya akan dijadikan landasan bagi penyusunan KUA serta PPAS dalam rangka penyusunan RAPBD Kota Surabaya Tahun 2022, penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dimana Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai Pedoman untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran organisasi Perangkat Daerah (RKA OPD).

Adapun gambaran tentang hubungan antara Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya dengan dokumen perencanaan lainnya dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1.1 dan gambar 1.2.

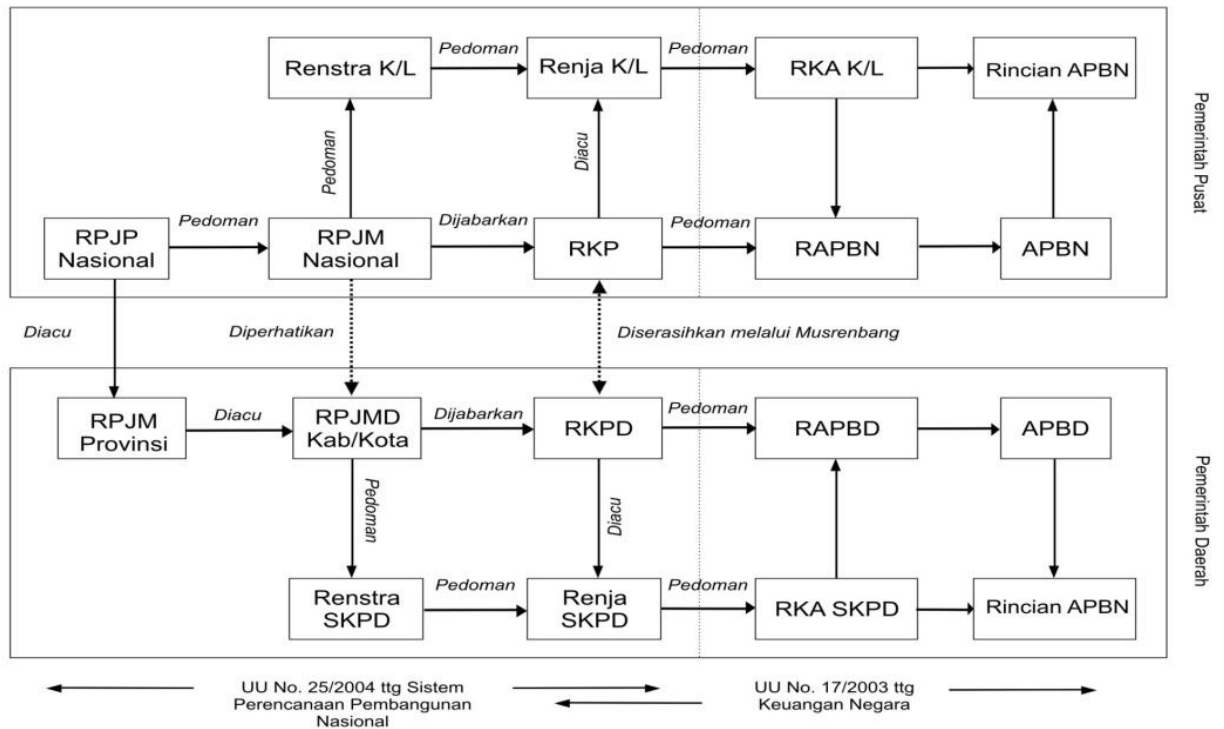
Gambar 1.1

Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah



Gambar 1. 2

Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran



1.2. Landasan Hukum

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya, Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan dinas Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pembentukan lembaga ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kota Surabaya terhadap pentingnya upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan peningkatan kualitas hidup khususnya perempuan dan anak masyarakat Kota Surabaya. Upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dilakukan secara lebih transparan dengan menginformasikan program dan kegiatan yang ada di Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya.

Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai bagian dari Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan di bidang

pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak perlu menyusun rencana strategis yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Surabaya sebagai landasan dalam melaksanakan kegiatan.

1.2.1 Kelembagaan

Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya, Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan struktur organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahi:
 - a. Seksi Pembinaan Pemberdayaan Perempuan;
 - b. Seksi Pengarusutamaan Gender dan Peran Aktif Perempuan.
4. Bidang Kesejahteraan Keluarga, membawahi:
 - a. Seksi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga;
 - b. Seksi Ketahanan Keluarga.
5. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, membawahi:
 - a. Seksi Keluarga Berencana;
 - b. Seksi Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE);
6. Bidang Pengarusutamaan Hak Anak, Perlindungan Perempuan dan Anak, membawahi:
 - a. Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - b. Seksi Pengarusutamaan Hak Anak.
7. Kelompok Jabatan Fungsional

1.2.2 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 55 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya. Uraian Tugas Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan

Sedangkan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak antara lain :

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.2.3 Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja PD meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244) ;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6222);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 007 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
17. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

- Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 23. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 - 2024;
 24. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 20 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 20);
 25. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah (Lembara Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
 26. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 – 2025;
 27. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014 – 2034;
 28. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya;

29. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 55 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Maksud penyusunan Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya tahun 2022 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1.3.2 Tujuan Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Tujuan penyusunan Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya adalah:

1. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;
2. Menjadi pedoman bagi Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;
3. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi maupun urusan wajib dan pilihan Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui capaian target kinerja program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;
4. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang perlu disampaikan kepada Pemerintah Kota.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya Tahun 2022 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usu;an Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1. Faktor-Faktor yang Menjadi Pertimbangan dalam Penetapan Program dan Kegiatan
- 4.2. Garis Besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan
- 4.3. Program dan Kegiatan

BAB V. PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada bagian ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020. Kajian (review) Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

1. Program Keadilan dan Kesetaraan Gender serta Pemberdayaan Perempuan dengan indikator Kinerja Program yang pertama, persentase kelurahan yang responsif gender dengan realisasi tahun 2020 sebesar 20,13% dan target tahun 2021 sebesar 41,56%. Yang kedua, Persentase Perangkat Daerah Pemerintah Kota Surabaya yang telah menerapkan responsif gender dalam pelaksanaan kegiatan dengan realisasi tahun 2020 100% dan target tahun 2021 sebesar 100%. Capaian Program tersebut dicapai melalui kegiatan berikut:
 - a) Fasilitasi Pembinaan Organisasi Perempuan dengan indikator kinerja jumlah fasilitasi pembinaan organisasi perempuan. Target Tahun 2020 yaitu 16 kali. Realisasi tahun 2020 16 kali. Persentase realisasi tahun 2020 yaitu 100%.
 - b) Penguatan dan Pengembangan Jaringan Pengarusutamaan Gender dengan indikator kinerja kegiatan jumlah lembaga penguatan dan pengembangan jaringan pengarusutamaan gender. Target tahun 2020 adalah 72 lembaga dan realisasi tahun 2020 yaitu 72 lembaga. Persentase realisasi tahun 2020 yaitu 100%.
 - c) Penyusunan Profil Gender dan Evaluasi Atas Implementasi Pengarusutamaan Gender di Kota Surabaya dengan indikator kinerja jumlah dokumen yang disusun. Target kinerja tahun 2020 2 dokumen dan realisasi 2 dokumen. Persentase realisasi tahun 2020 yaitu 100%.
2. Program perlindungan perempuan dan anak yang memiliki 3 indikator kinerja program dengan penjabaran sebagai berikut:
 - Persentase efektivitas pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (PPTP2A), target tahun 2020 adalah 73,84% dan realisasi tahun 2020 sebesar 84%. Sehingga melebihi target realisasi sebesar 113,76%. Target tahun 2021 sebesar 74,98%.

- Persentase kelurahan ramah anak, target tahun 2020 84,42%, realisasi tahun 2020 77,27%. Sehingga tingkat realisasi tahun 2020 tercapai sebesar 91,53%. Target tahun 2021 sebesar 100%.
- Persentase permasalahan perempuan dan anak yang ditangani, target tahun 2020 adalah 100%, realisasi kinerja tahun 2020 100%. Persentase realisasi tahun 2020 yaitu 100%. Target tahun 2021 sebesar 100%.

Capaian Program tersebut dicapai melalui kegiatan berikut:

- a) Capacity Building bagi relawan Pusat Krisis Berbasis Masyarakat (PKBM) dan Satuan Petugas Perlindungan Perempuan dan Anak dengan indikator kegiatan Jumlah orang yang mengikuti capacity building. Target tahun 2020 yaitu 926 orang. Realisasi target tahun 2020 yaitu 942 orang. Persentase realisasi tahun 2020 yaitu 101,73%.
 - b) Fasilitasi Pencapaian Indikator Kota Layak Anak dengan indikator kegiatan Jumlah lembaga yang difasilitasi dalam pencapaian indikator Kota Layak Anak. Target kinerja tahun 2020 adalah 279 lembaga dan realisasi tahun 2020 279 lembaga. Persentase realisasi tahun 2020 yaitu 100%.
 - c) Pembinaan Pengembangan Kampung Arek Suroboyo dengan indikator kegiatan jumlah Kampung Arek Suroboyo yang dibina dan dikembangkan. Target tahun 2020 sebanyak 154 kampung. Realisasi tahun 2020 yaitu 154 kampung. Persentase realisasi tahun 2020 yaitu 100%.
 - d) Pendampingan dan Pembinaan Penanganan Permasalahan Perempuan dan Anak dengan indikator kegiatan jumlah pendampingan dan pembinaan penanganan permasalahan perempuan dan anak. Target tahun 2020 yaitu 200 kasus. Realisasi tahun 2020 yaitu 233 kasus. Persentase realisasi tahun 2020 yaitu 116,50%.
 - e) Penyelenggaraan Operasional Shelter dengan indikator kegiatan Jumlah shelter yang diselenggarakan operasionalnya selama 12 bulan. Target tahun 2020 yaitu 2 lembaga. Realisasi tahun 2020 yaitu 2 lembaga. Persentase realisasi tahun 2020 yaitu 100%.
3. Program Keluarga Berencana yang memiliki 4 indikator kinerja program dengan penjabaran sebagai berikut:
- Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmeet need). Target tahun 2020 adalah 19,47%, realisasi tahun 2020 sebesar 17,63%. Persentase capaian realisasi (lower is better) tahun 2020 yaitu 109,45%. Target tahun 2021 yaitu 19,22%.

- Persentase peserta KB aktif. Target tahun 2020 adalah 80,89%, realisasi tahun 2020 sebesar 82.37%. Persentase realisasi tahun 2020 yaitu 101.83%. Target tahun 2021 yaitu 80,95%.
- Persentase peserta KB aktif yang drop out kontrasepsi. Target tahun 2020 adalah 2,99%, realisasi tahun 2020 sebesar 0,16%. Persentase capaian realisasi (lower is better) tahun 2020 yaitu 194.53%. Target tahun 2021 yaitu 2,78%.
- Persentase peserta KB baru. Target tahun 2020 adalah 53,25%, realisasi tahun 2020 sebesar 50.76%. Persentase realisasi tahun 2020 yaitu 95.32%. Target tahun 2021 yaitu 97,94%.

Capaian program tersebut dicapai melalui kegiatan berikut:

- a) Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK Bidang Keluarga Berencana) dengan indikator kegiatan Jumlah Lembaga yang Mendapat Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK Bidang Keluarga Berencana). Target tahun 2020 yaitu 31 lembaga. Realisasi tahun 2020 yaitu 31 lembaga. Persentase realisasi tahun 2020 yaitu 100%.
 - b) Fasilitasi penggerakan program kependudukan dan keluarga berencana dengan indikator kegiatan Jumlah orang yang mengikuti penggerakan program kependudukan dan keluarga berencana. Target tahun 2020 yaitu 1566 orang. Realisasi tahun 2020 yaitu 1566 orang. Tingkat realisasi tahun 2020 yaitu 100%.
 - c) Penyediaan Pelayanan KB Bagi Keluarga dengan indikator kegiatan kegiatan Jumlah akseptor KB yang mendapatkan pelayanan KB. Target tahun 2020 yaitu 290 orang. Dengan realisasi sebanyak 149 orang. Persentase realisasi tahun 2020 yaitu 51,38%.
 - d) Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan KB yang disediakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana dengan indikator kegiatan Jumlah sarana dan prasarana pelayanan KB yang disediakan melalui Dana Alokasi Khusus bidang keluarga berencana. Target tahun 2020 yaitu 62 paket. Realisasi tahun 2020 yaitu 64 paket. Persentase realisasi tahun 2020 yaitu 103,23%.
 - e) Pengadaan Sarana Penurunan Stunting (DAK) Bidang Keluarga Berencana dengan indikator kegiatan jumlah sarana BKB Kit yang disediakan. Target tahun 2020 yaitu 4 unit. Realisasi tahun 2020 yaitu 4 unit. Persentase realisasi tahun 2020 yaitu 100%.
4. Program Peningkatan Ketahanan Keluarga memiliki 2 indikator program dengan penjabaran sebagai berikut:

- Persentase Kelompok Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia yang aktif. Target tahun 2020 adalah 100%, realisasi tahun 2020 sebesar 100%. Persentase realisasi tahun 2020 yaitu 100%. Target tahun 2021 yaitu 100%.
- Persentase perempuan usia produktif dari hasil pendampingan yang berproduksi. Target tahun 2020 adalah 19,67%, realisasi tahun 2020 sebesar 21,74%. Persentase realisasi tahun 2020 yaitu 110,52%. Target tahun 2021 yaitu 10,33%.

Capaian program tersebut dicapai melalui kegiatan berikut:

- a) Fasilitasi dan Pendampingan Inkubasi Usaha Mandiri dengan indikator kegiatan Jumlah orang yang difasilitasi dan mendapatkan pendampingan inkubasi usaha mandiri. Target tahun 2020 yaitu 22 orang. Realisasi tahun 2020 yaitu 23 orang. Persentase realisasi tahun 2020 yaitu 104,55%.
 - b) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi dengan indikator kegiatan Jumlah lembaga yang mendapat fasilitas pengembangan usaha ekonomi. Target tahun 2020 yaitu 5 lembaga. Realisasi tahun 2020 yaitu 5 lembaga. Persentase realisasi tahun 2020 yaitu 100%.
 - c) Pembinaan Keluarga Sejahtera dengan indikator kegiatan Jumlah orang yang mengikuti pembinaan keluarga sejahtera. Target tahun 2020 yaitu 180 orang. Realisasi tahun 2020 yaitu 180 orang. Persentase realisasi tahun 2020 yaitu 100%.
 - d) Pembinaan terhadap Pendampingan Bina Keluarga Balita/Bina Keluarga Remaja/Bina Keluarga Lansia dengan indikator kegiatan Jumlah pendamping yang mengikuti pembinaan Bina Keluarga Balita/Bina Keluarga Remaja/Bina Keluarga Lansia yang didampingi. Target tahun 2020 yaitu 978 orang dan realisasi tahun 2020 yaitu 978 orang dengan persentase sebesar 100%.
 - e) Pengelolaan Rumah Kreatif dengan indikator kegiatan jumlah rumah kreatif yang dikelola selama 12 bulan. Target tahun 2020 yaitu 1 bangunan. Realisasi tahun 2020 yaitu 1 bangunan. Persentase realisasi tahun 2020 yaitu 100%.
 - f) Penyelenggaraan Operasional PUSPAGA dengan indikator kegiatan Jumlah PUSPAGA yang diselenggarakan operasionalnya selama 12 bulan. Target tahun 2020 yaitu 2 lembaga. Realisasi tahun 2020 yaitu 2 lembaga. Persentase realisasi tahun 2020 yaitu 100%.
5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan indikator program Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran. Target tahun 2020 adalah 87%, realisasi tahun 2020 sebesar 88,22%. Sehingga persentase realisasi tahun

2020 sebesar 101,40%. Sedangkan target tahun 2021 sebesar 88%. Program tersebut dicapai melalui kegiatan :

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah dengan indikator kegiatan persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran. Target tahun 2020 yaitu 100% dan terealisasi sebesar 100%.

6. Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan dengan 2 indikator kinerja program sebagai berikut :

- Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran dengan target tahun 2020 sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100%. Target tahun 2021 yaitu 100%.
- Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran dengan target tahun 2020 yaitu 100%. Realisasi tahun 2020 yaitu 99.50%. Target tahun 2021 yaitu 100%.

Capaian program tersebut dicapai melalui kegiatan:

Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran dengan indikator kegiatan persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran. Target tahun 2020 yaitu 100%. Realisasi tahun 2020 yaitu 100%. Tingkat realisasi tahun 2020 yaitu 100%.

Tabel T-C.29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020
Kota Surabaya

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	Urusan Pemerintahan									
1.1	Wajib									
1.1.2	Non Pelayanan Dasar									
1.1.2.02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
1.1.2.02.01	Program Keadilan dan Kesetaraan Gender serta Pemberdayaan Perempuan									
		<i>Persentase kelurahan yang responsif gender</i>	-	20.13%	20.13%	20.13%	100%	41.56%	-	-
		<i>Persentase Perangkat Daerah Pemerintah Kota Surabaya yang telah menerapkan responsif gender dalam pelaksanaan kegiatan</i>	-	100%	100%	100%	100%	100%	-	-
1.1.2.02.01.0001	Fasilitasi Pembinaan Organisasi Perempuan	<i>Jumlah fasilitasi pembinaan organisasi perempuan</i>			16 kali	16 kali	100%	-	-	-
1.1.2.02.01.0002	Penguatan dan Pengembangan Jaringan Pengarusutamaan Gender	<i>jumlah lembaga yang mengikuti Penguatan dan Pengembangan Jaringan Pengarusutamaan Gender</i>			72 lembaga	72 lembaga	100%	-	-	-
1.1.2.02.01.0003	Penyusunan Profil Gender dan Evaluasi Atas Implementasi Pengarusutamaan Gender di Kota Surabaya	<i>Jumlah dokumen yang disusun</i>			2 dokumen	2 dokumen	100%	-	-	-
1.1.2.02.02	Program Perlindungan Perempuan dan Anak									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		<i>Persentase efektivitas pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (PPTP2A)</i>	-	73.84%	73.84%	84.00%	113.76%	74.98%	-	-
		<i>Persentase kelurahan ramah anak</i>	-	84.42%	84.42%	77.27%	91.53%	100%	-	-
		<i>Persentase permasalahan perempuan dan anak yang ditangani</i>	-	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%	-	-
1.1.2.02.02.0001	Capacity Building bagi relawan Pusat Krisis Berbasis Masyarakat (PKBM) dan Satuan Petugas Perlindungan Perempuan dan Anak	<i>Jumlah orang yang mengikuti Capacity Building</i>			926 orang	942 orang	101.73 %	-	-	-
1.1.2.02.02.0002	Fasilitasi Pencapaian Indikator Kota Layak Anak	<i>jumlah lembaga yang difasilitasi dalam pencapaian indikator kota layak anak</i>			279 lembaga	279 lembaga	100%	-	-	-
1.1.2.02.02.0003	Pembinaan Pengembangan Kampung Arek Suroboyo	<i>Jumlah kampung Kampunge Arek Suroboyo yang dibina dan dikembangkan</i>			154 kampung	154 kampung	100%	-	-	-
1.1.2.02.02.0004	Pendampingan dan Pembinaan Penanganan Permasalahan Perempuan Dan Anak	<i>Jumlah Pendampingan dan Pembinaan Penanganan Permasalahan Perempuan Dan Anak</i>			200 kasus	233 kasus	116.50 %	-	-	-
1.1.2.02.02.0005	Penyelenggaraan Operasional Shelter	<i>Jumlah shelter yang diselenggarakan operasionalnya selama 12 bulan</i>			2 lembaga	2 lembaga	100%	-	-	-
1.1.2.07	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
1.1.2.07.01	Program Keluarga Berencana									
		<i>Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)</i>	-	19.47%	19.47%	17.63%	109.45%	19.22%	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Persentase peserta KB aktif	-	80.89%	80.89%	82.37%	101.83%	80.95%	-	-
		Persentase peserta KB aktif yang drop out kontrasepsi	-	2.99%	2.99%	0.16%	194.53%	2.78%	-	-
		Persentase peserta KB baru	-	53.25%	53.25%	50.76%	95.32%	97.94%	-	-
1.1.2.07.01.0001	Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK Bidang Keluarga Berencana)	jumlah lembaga yang mendapat Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK Bidang Keluarga Berencana)			31 lembaga	31 lembaga	100%	-	-	-
1.1.2.07.01.0002	Fasilitasi Penggerakan Program Kependudukan dan Masyarakat Peduli Keluarga Berencana	Jumlah orang Yang Mengikuti Penggerakan Program Kependudukan dan Masyarakat Peduli Keluarga Berencana			1566 orang	1566 orang	100%	-	-	-
1.1.2.07.01.0003	Penyediaan Pelayanan KB Bagi Keluarga	Jumlah akseptor KB yang mendapatkan pelayanan KB			290 orang	149 orang	51.38%	-	-	-
1.1.2.07.01.0004	Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan KB yang disediakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana	jumlah sarana dan prasarana pelayanan KB yang disediakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana			62 Paket	64 Paket	103.23%	-	-	-
1.1.2.07.01.0006	Pengadaan Sarana Penurunan Stunting (DAK) Bidang Keluarga Berencana	Jumlah Sarana BKB Kit yang disediakan			4 unit	4 unit	100%	-	-	-
1.1.2.07.02	Program Peningkatan Ketahanan Keluarga									
		Persentase kelompok Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, dan Bina Keluarga Lansia yang aktif	-	100%	100%	100%	100%	100%	-	-
		Persentase perempuan usia produktif dari hasil pendampingan yang memproduksi	-	19.67%	19.67%	21.74%	110.52%	10.33%	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.1.2.07.02.0001	Fasilitasi dan Pendampingan Inkubasi Usaha Mandiri	Jumlah orang yang difasilitasi dan mendapatkan pendampingan inkubasi usaha mandiri			22 orang	23 orang	104.55 %	-	-	-
1.1.2.07.02.0002	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi	Jumlah lembaga yang mendapat fasilitasi pengembangan usaha ekonomi			5 lembaga	5 lembaga	100%	-	-	-
1.1.2.07.02.0003	Pembinaan Keluarga Sejahtera	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan keluarga sejahtera			180 orang	180 orang	100%	-	-	-
1.1.2.07.02.0004	Pembinaan terhadap Pendamping Bina Keluarga Balita/Bina Keluarga Remaja/Bina Keluarga Lansia	Jumlah pendamping yang mengikuti pembinaan Bina Keluarga Balita/Bina Keluarga Remaja/Bina Keluarga Lansia yang didampingi			978 orang	978 orang	100%	-	-	-
1.1.2.07.02.0005	Pengelolaan Rumah Kreatif Handycraft	Jumlah rumah kreatif yang dikelola selama 12 bulan			1 bangunan	1 bangunan	100%	-	-	-
1.1.2.07.02.0006	Penyelenggaraan Operasional PUSPAGA	Jumlah Puspaga yang diselenggarakan operasionalnya selama 12 bulan			2 lembaga	2 lembaga	100%	-	-	-
2	Penunjang Urusan Pemerintahan									
2.2	Unsur Manajemen									
2.2.2	Non Pelayanan Dasar									
2.2.2.01	Sarana dan Prasarana Perkantoran									
2.2.2.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	-	87%	87%	88.22%	101.40%	88%	-	-
2.2.2.01.01.0030	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran			100%	100%	100%	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.2.2.01.02	Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan									
		<i>Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran</i>	-	100%	100%	100%	100%	100%	-	-
		<i>Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik</i>	-	100%	100%	99.50%	99.50%	100%	-	-
2.2.2.01.02.0030	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	<i>Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran</i>			100%	100%	100%	-	-	-

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dengan tingkat kepadatan penduduk di beberapa kecamatan yang mencapai lebih dari 20.000 jiwa yaitu Kecamatan Wonokromo, Tegalsari, Sawahan, Tambaksari, Simokerto, Bubutan, Semampir dan Kenjeran, program-program terkait dengan penyediaan pelayanan pendidikan, kesehatan, perumahan, lingkungan, pemberdayaan, keluarga berencana, sanitasi dan air bersih diarahkan ke wilayah-wilayah yang padat penduduk sehingga dapat meningkatkan kualitas lingkungan, sosial maupun ekonomi warga.

Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya sebagai Lembaga Teknis Kota Surabaya mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat khusus yaitu di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana dengan kegiatan pelayanan kepada masyarakat melalui Penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan dan monitoring di bidang penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat skala kota. Selain itu juga memberikan pelayanan dengan Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, evaluasi dan monitoring penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala kota. Di bidang perlindungan perempuan dan anak bentuk layanan yang diberikan adalah koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dan anak terutama perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak skala kota.

Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 55 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya berdasarkan tugas dan fungsinya bisa dilihat dari

capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Berikut capaian pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya dalam tabel T-C.30.

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Surabaya

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020 (thn n-2)	Tahun 2021 (thn n-1)	Tahun 2022 (thn n)	Tahun 2023 (thn n+1)	Tahun 2020 (thn n-2)	Tahun 2021 (thn n- 1)	Tahun 2022 (thn n)	Tahun 2023 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Jumlah orang yang mengikuti Capacity Building	-	-	926 orang	926 orang	-	-	942 orang	-	-	-	-
2	Jumlah lembaga yang difasilitasi dalam pencapaian indikator kota layak anak	-	-	431 lembaga	431 lembaga	-	-	279 lembaga	-	-	-	Rasionalisasi
3	Jumlah kampung Kampunge Arek Suroboyo yang dibina dan dikembangkan	-	-	154 kampung	154 kampung	-	-	154 kampung	-	-	-	Rasionalisasi
4	Jumlah Pendampingan dan Pembinaan Penanganan Permasalahan Perempuan Dan Anak	-	-	200 kasus	200 kasus	-	-	230 kasus	-	-	-	Rasionalisasi
5	Jumlah shelter yang diselenggarakan operasionalnya selama 12 bulan	-	-	2 lembaga	2 lembaga	-	-	2 lembaga	-	-	-	Rasionalisasi
6	Jumlah fasilitasi pembinaan organisasi perempuan	-	-	29 kali	29 kali	-	-	16 kali	-	-	-	Rasionalisasi
7	Jumlah lembaga yang mengikuti Penguatan dan Pengembangan Jaringan Pengarusutamaan Gender	-	-	289 lembaga	289 lembaga	-	-	72 lembaga	-	-	-	Rasionalisasi
8	Jumlah dokumen yang disusun	-	-	2 dokumen	2 dokumen	-	-	2 dokumen	-	-	-	Rasionalisasi
9	Jumlah lembaga yang mendapat Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK Bidang Keluarga Berencana)	-	-	31 lembaga	31 lembaga	-	-	31 lembaga	-	-	-	Rasionalisasi
10	Jumlah orang Yang Mengikuti Penggerakan Program Kependudukan dan Masyarakat Peduli Keluarga Berencana	-	-	2208 orang	2208 orang	-	-	1566 orang	-	-	-	Rasionalisasi
11	Jumlah Sarana BKB Kit yang disediakan	-	-	4 unit	4 unit	-	-	5 unit	-	-	-	Rasionalisasi
12	Jumlah akseptor KB yang mendapatkan pelayanan KB	-	-	650 orang	650 orang	-	-	149 orang	-	-	-	Rasionalisasi
13	Jumlah sarana dan prasarana pelayanan KB yang disediakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana	-	-	52 unit	52 unit	-	-	64 paket	-	-	-	Rasionalisasi

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020 (thn n-2)	Tahun 2021 (thn n-1)	Tahun 2022 (thn n)	Tahun 2023 (thn n+1)	Tahun 2020 (thn n-2)	Tahun 2021 (thn n- 1)	Tahun 2022 (thn n)	Tahun 2023 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	Jumlah orang yang difasilitasi dan mendapatkan pendampingan inkubasi usaha mandiri	-	-	100 orang	100 orang	-	-	23 orang	-	-	-	Rasionalisasi
15	Jumlah lembaga yang mendapat fasilitasi pengembangan usaha ekonomi	-	-	15 lembaga	15 lembaga	-	-	5 lembaga	-	-	-	Rasionalisasi
16	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan keluarga sejahtera	-	-	1240 orang	1240 orang	-	-	180 orang	-	-	-	Rasionalisasi
17	Jumlah pendamping yang mengikuti pembinaan Bina Keluarga Balita/Bina Keluarga Remaja/Bina Keluarga Lansia yang didampingi	-	-	1350 orang	1350 orang	-	-	978 orang	-	-	-	Rasionalisasi
18	Jumlah rumah kreatif yang dikelola selama 12 bulan	-	-	1 bangunan	1 bangunan	-	-	1 bangunan	-	-	-	Rasionalisasi
19	Jumlah Puspaga yang diselenggarakan operasionalnya selama 12 bulan	-	-	2 lembaga	2 lembaga	-	-	2 lembaga	-	-	-	Rasionalisasi
20	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	-	-	100%	100%	-	-	100%	-	-	-	Rasionalisasi
21	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	-	-	100%	100%	-	-	100%	-	-	-	Rasionalisasi

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak antara lain:

- a. Untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat adalah dengan mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dengan mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui Keluarga Berencana sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2015-2019.
- b. Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak pasti akan terjadi setiap tahun, tindak kekerasan yang terjadi umumnya adalah tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), non KDRT maupun *trafficking* (perdagangan orang).
- c. Salah satu program untuk penanggulangan kemiskinan adalah dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui pemberdayaan masyarakat. Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui pemberdayaan perempuan yaitu dengan penyelenggaraan kegiatan inkubasi usaha mandiri, dan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi melalui promosi dan pemeran.
- d. Masih adanya ketimpangan gender yang terjadi baik di pemerintahan maupun masyarakat.

2.3.1 Tingkat Kinerja Perangkat Daerah

Capaian Renja tahun 2019 Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara keseluruhan hampir tercapai 100%. Begitu pula pada Renja tahun 2020 capaian realisasi terhadap target mendekati angka 100% di semua kegiatan.

Sedangkan Capaian Renstra 2016-2021 Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sampai dengan tahun 2020 hampir seluruh kegiatan memenuhi target yang telah ditetapkan, meskipun di tahun 2020 banyak indikator kinerja dan target kegiatan yang berubah, mengikuti perubahan Misi Kepala Daerah Kota Surabaya.

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan

Pada pelaksanaan Renja tahun 2021 tidak ditemukan permasalahan dan hambatan yang berarti dan apabila terdapat hambatan bisa dengan cepat dicarikan solusi melalui koordinasi. Hal ini dapat dilakukan berkat dukungan dana yang sudah dianggarkan, serta dukungan sumber daya manusia yang menjalankan semua program dan kegiatan yang telah direncanakan oleh Dinas

Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya. Sedangkan untuk tahun 2020 terdapat terdapat beberapa kendala yang menjadi tantangan akibat adanya pandemi Covid-19 yang mempengaruhi seluruh sektor pembangunan.

Permasalahan dan Hambatan yang muncul bisa diidentifikasi melalui analisa kekuatan dan kelemahan dari pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , yang dijabarkan sebagai berikut:

a. Kekuatan yang dimiliki terdiri dari:

1. Anggaran kegiatan
2. Sarana dan Prasarana perkantoran
3. Kewenangan untuk melaksanakan program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
4. Kewenangan untuk melaksanakan program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
5. Kewenangan untuk melaksanakan program Program Pengendalian Penduduk
6. Kewenangan untuk melaksanakan program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
7. Kewenangan untuk melaksanakan program Peningkatan Kualitas Keluarga
8. Kewenangan untuk melaksanakan program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
9. Kewenangan untuk melaksanakan program Perlindungan Perempuan
10. Kewenangan untuk melaksanakan program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
11. Kewenangan untuk melaksanakan Perlindungan Khusus Anak
12. SOP untuk pelaksanaan kegiatan

b. Kelemahan yang dimiliki antara lain:

1. Jumlah dan Kompetensi SDM
2. Jumlah dan kondisi kelayakan kendaraan Operasional untuk mendukung pelaksanaan kegiatan
3. Pemanfaatan data penjangkauan masyarakat

c. Permasalahan terkait capaian kinerja dalam rancangan teknokratik RPJMD 2022-2026 terdiri dari :

1. Belum optimalnya KIE terkait kesehatan reproduksi dan pembangunan keluarga bagi remaja;
2. Belum optimalnya capaian Kelurahan Ramah Anak;
3. Belum optimalnya partisipasi perempuan dalam Ipoleksosbud;
4. Belum optimalnya kegiatan usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
5. Belum optimalnya penggunaan Metode KB Jangka Panjang;
6. Masih adanya permasalahan pada perempuan dan anak.

2.3.3 Peluang dan Tantangan

Peluang dan tantangan yang dihadapi Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan Tugas dan fungsinya, dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Peluang yang dimiliki terdiri dari:

1. Peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah
2. Dukungan masyarakat dan lembaga berbasis masyarakat
3. Dukungan pihak swasta, akademisi dan instansi pemerintah lainnya
4. Sinergitas pemberdayaan masyarakat antar PD

b. Ancaman yang dimiliki terdiri dari:

1. Penduduk luar Kota Surabaya yang memanfaatkan fasilitas dan layanan Kota Surabaya
2. Overlapping program dan kegiatan antar PD
3. Pengaruh media sosial terhadap tumbuh kembang anak
4. Kondisi pandemi yang tidak bisa diperkirakan selesainya

2.3.4 Isu-Isu Penting/Strategis Pelayanan Perangkat Daerah

Isu-isu penting/Strategis pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2022, antara lain sebagai berikut:

1. Adanya kewenangan untuk melaksanakan program pemberdayaan, khususnya pemberdayaan ekonomi dan pembinaan kepada masyarakat.

2. Adanya kewenangan untuk melaksanakan program Keluarga Berencana & Keluarga Sejahtera sehingga terwujud keluarga yang berkualitas.
3. Keterlibatan masyarakat dan lembaga berbasis masyarakat dalam menunjang pelaksanaan program.
4. Adanya kewenangan untuk melaksanakan program perlindungan perempuan dan anak sehingga permasalahan perempuan dan anak dapat tertangani dengan baik.
5. Adanya kewenangan untuk melaksanakan program pemberdayaan perempuan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap Rancangan RKPD pada sub kegiatan di Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Surabaya sebagai berikut :

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah memiliki satu sub kegiatan yaitu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan pagu anggaran Rp. 11.749.118.462,- outputnya terdiri dari :

Target	:	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN 100%
Kelompok Sasaran	:	ASN pada Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Bentuk Kegiatan	:	Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN
Materi Kegiatan	:	Tersedianya anggaran pemenuhan gaji dan tunjangan ASN
Frekuensi Pelaksanaan	:	12 bulan
Alasan Pemilihan Target	:	Pertimbangan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan Peraturan Walikota nomor 55 tahun 2016 Pasal 5 Ayat 2 (d) dan Pasal 6 Ayat 2 (b), Peraturan Walikota Surabaya Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.

2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah memiliki satu sub kegiatan yaitu Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan pagu anggaran semula Rp. 3.390.887.800,- outputnya terdiri dari :

Target	:	Persentase penyediaan barang dan jasa perkantoran 100%
Kelompok Sasaran	:	Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Bentuk Kegiatan	:	Penyediaan barang dan jasa perkantoran
Materi Kegiatan	:	Pemenuhan ketersediaan barang dan jasa perkantoran agar tercapai efektivitas pekerjaan

- Frekuensi Pelaksanaan : 12 bulan
 Alasan Pemilihan Target : Pertimbangan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan Peraturan Walikota nomor 55 tahun 2016 Pasal 5 Ayat 2 (f) dan Pasal 6 Ayat 1 (e)
3. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah memiliki satu sub kegiatan yaitu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan pagu anggaran semula Rp. 570.766.931,- menjadi Rp. 486.213.248,- outputnya terdiri dari :
- Target : Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran 100%
 Kelompok Sasaran : Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 Bentuk Kegiatan : Pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran
 Materi Kegiatan : Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran
 Frekuensi Pelaksanaan : 12 bulan
 Alasan Pemilihan Target : Pertimbangan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan Peraturan Walikota nomor 55 tahun 2016 Pasal 5 Ayat 2 (f) dan Pasal 6 Ayat 1 (e).
4. Kegiatan Pelembagaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintahan Kewenangan Kabupaten/Kota memiliki satu sub kegiatan yaitu Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG dengan pagu anggaran semula Rp. 671.550.041,- menjadi Rp. 670.340.673,- outputnya terdiri dari :
- Target : 72 lembaga
 Kelompok Sasaran : Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Surabaya, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan di Kota Surabaya.
 Bentuk Kegiatan : Capacity Building, pendampingan dan evaluasi PUG, presentasi profil Kecamatan Responsif Gender, diskusi interaktif, serta simulasi materi yang dipandu oleh pemateri/praktisi.
 Materi Kegiatan : Dilaksanakan dengan melakukan capacity building serta dilakukan evaluasi secara langsung sehingga diharapkan Pengarusutamaan Gender dapat diterapkan di masing-masing perangkat daerah.
 Frekuensi Pelaksanaan : Berdasarkan pertimbangan teknis pendampingan terhadap Perangkat Daerah dan Kecamatan
 Alasan Pemilihan Target : Membangun Sinergi dengan Perangkat Daerah, Kecamatan, Kelurahan perihal sosialisasi dan advokasi peningkatan pemahaman gender.
5. Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan memiliki satu sub kegiatan yaitu Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi dengan pagu anggaran Rp. 378.556.181,-,- outputnya terdiri dari :

- Target : 9 kali
- Kelompok Sasaran : Tim Penggerak Pemberdayaan & Kesejahteraan Keluarga (TP. PKK) Kota Surabaya dan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Surabaya, serta gabungan Organisasi Wanita Kota Surabaya.
- Bentuk Kegiatan : Peningkatan Pemberdayaan Perempuan di Kelurahan, Capacity Building Organisasi Perempuan, Pemberdayaan Perempuan Bidang Ipelekosbud, Peringatan Hari Kartini (DWP), Capacity Building bagi Anggota (DWP), Pelatihan Keterampilan DWP, Peringatan Hari Ibu dan HUT DWP, Seminar Kerohanian Organisasi Perempuan DWP, Sosialisasi Program Kerja Kegiatan TP PKK, Pelatihan Kader PKK, Peringatan Hari Kesatuan TP PKK Ke 49, Mengadakan Lomba 10 Program Pokok PKK dilaksanakan melalui penilaian administrasi, Persiapan mengikuti Lomba Pelaksana Terbaik 10 Program Pokok PKK Tk Jawa Timur, Lomba Kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) antar TP. PKK Kecamatan se-Kota Surabaya, Persiapan mengikuti Lomba PHBS dalam rangka Terbaik Kesatuan Gerak PKK-KB-KKBPK Kes Tingkat Provinsi Jawa Timur, Mengadakan Lomba PHBS dalam rangka Kesatuan Gerak PKK-KB-KKBPK antar PKK Kecamatan se-Kota Surabaya Tahun 2021, Pembentukan UP2K-PKK bagi Kelurahan yang belum ada Kelompok UP2K, Sosialisasi tentang Cara Mengatasi Stress Akibat Pandemi Covid 19.
- Materi Kegiatan : Peningkatan Peran Organisasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi.
- Frekuensi Pelaksanaan : Dilaksanakan sebanyak 9 kali.
- Alasan Pemilihan Target : TP. PKK Kota Surabaya merupakan pemerhati pemberdayaan perempuan di Kecamatan / Kelurahan dan Dharma Wanita Persatuan (DWP) yang merupakan Organisasi Kewanitaan beranggotakan istri PNS sebagai mitra kerja Pemerintah dalam mendorong program-program yang dapat meningkatkan kemandirian perempuan di bidang ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya, serta bidang strategis lainnya.

6. Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk memiliki satu sub kegiatan yaitu Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal dengan pagu anggaran Rp. 206.942.067,- outputnya terdiri dari :

- Target : 399 Sekolah
- Kelompok Sasaran : Satuan Pendidikan Jenjang SLTP / MTS
- Bentuk Kegiatan : Sosialisasi dan Pembinaan tentang Pendidikan Kependudukan dilakukan melalui strategi Internalisasi

Program KKBPk kepada Siswa dan program integrasi mata pelajaran terhadap penjelasan tambahan tentang Program KKBPk program-program pendidikan/pembelajaran di sekolah, seperti Gemar Membaca/GLS, Pelatihan Guru, Rumah Belajar, Bimbingan konseling, dsb.

Materi Kegiatan : Materi pengetahuan dan wawasan dengan tujuan yang diharapkan dengan adanya program SSK ini tentu saja selain memupuk kesadaran akan kondisi kependudukan di wilayah tempat tinggal masing-masing siswa, juga menumbuhkan sikap bertanggung jawab dan perilaku adaptif berkaitan dengan dinamika kependudukan.

Frekuensi Pelaksanaan : 2 Kali setahun

Alasan Pemilihan Target : Sekolah Siaga Kependudukan, merupakan wadah bagi program-program yang telah digulirkan BKKBN sebelumnya seperti PIK Remaja Jalur Pendidikan dan Genre

7. Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota memiliki satu sub kegiatan yaitu Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB dengan pagu anggaran Rp. 116.796.352,- outputnya terdiri dari :

Target : 1 Dokumen

Kelompok Sasaran : Meningkatnya penggunaan dan pemanfaatan data kependudukan pada Organisasi Perangkat Daerah dan Organisasi Linas Sektor untuk Pembangunan Daerah

Bentuk Kegiatan : Penyusunan Profil Kependudukan untuk Mendeskripsikan : aspek kuantitas pendudukan Kota Surabaya, yaitu jumlah, komposisi dan distribusi penduduk Kota Surabaya, aspek pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kota Surabaya, aspek kualitas kependudukan yaitu indeks pembangunan manusia beserta komponen penentunya

Materi Kegiatan : Penyusunan Profil Kependudukan

Frekuensi Pelaksanaan : 1 Kali setahun

Alasan Pemilihan Target : Data dan informasi kependudukan merupakan informasi strategis dan sangat dibutuhkan oleh berbagai pihak.

8. Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) memiliki dua sub kegiatan yaitu:

Sub Kegiatan : Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPk untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)

Target : 12 Kali

Pagu Anggaran : Rp. 1.388.788.798,-

Kelompok Sasaran : Penyuluh KB/PLKB/PLKB, PPKBD, Sub PPKBD

Bentuk Kegiatan : Sasaran biaya operasional pembinaan kader diberikan kepada petugas lini lapangan yang melakukan

- pembinaan kepada Penyuluh KB/PLKB/PLKB, PPKBD, Sub PPKBD
- Materi Kegiatan : Dengan adanya pembiayaan operasional pembinaan bagi kader yang dilakukan oleh petugas lini lapangan di Balai Penyuluhan KB diharapkan menghasilkan output pada peningkatan klasifikasi IMP dari berkembang menjadi mandiri
- Frekuensi Pelaksanaan : 12 Kali setahun
- Alasan Pemilihan Target : Menyesuaikan dengan Juknis DAK Non Fisik
- Sub Kegiatan** : Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
- Target : 1566 Orang
- Pagu Anggaran : Rp. 918.690.504,-
- Kelompok Sasaran : Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
- Bentuk Kegiatan : Pertemuan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) membahas rencana dan evaluasi pengelolaan program Bangga Kencana di wilayah masing-masing
- Materi Kegiatan : Materi teknis kesepahaman dan penguatan dukungan program Bangga Kencana, Capaian peserta KB baru, pemahaman kembali tentang Program KB seperti Kesehatan Reproduksi dan Stunting,
- Frekuensi Pelaksanaan : 12 Kali setahun
- Alasan Pemilihan Target : Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
9. Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota memiliki tiga sub kegiatan yaitu:
- Sub Kegiatan** : Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
- Target : 1950 Orang
- Pagu Anggaran : Rp. 2.685.013.738,-
- Kelompok Sasaran : Pasangan Usia Subur
- Bentuk Kegiatan : Pelayanan KB MKJP (IUD-Implant-MOP-MOW)
- Materi Kegiatan : Pelayanan KB MKJP (IUD-Implant-MOP-MOW)
- Frekuensi Pelaksanaan : 12 Bulan
- Alasan Pemilihan Target : Menyesuaikan dengan Juknis DAK Non Fisik
- Sub Kegiatan** : Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
- Target Semula : 52 unit
- Target Menjadi : 2 Jenis
- Pagu Anggaran Semula : Rp. 1.550.398.000,-
- Pagu Anggaran Menjadi : Rp. 1.541.132.331,-
- Kelompok Sasaran : Masyarakat
- Bentuk Kegiatan : Lelang(Tender) atau/dan Penunjukan Langsung atau/dan e-katalog.
- Materi Kegiatan : Lelang(Tender) atau/dan Penunjukan Langsung atau/dan e-katalog.
- Frekuensi Pelaksanaan : 1 kali
- Alasan Pemilihan Target : Secara umum maksud pemberian DAK Fisik Subbidang KB sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020

Tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Subbidang Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2021, antara lain adalah untuk:

- Mendukung tercapainya sasaran prioritas pembangunan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dalam mendukung tercapainya TFR sebesar 2,1 pada tahun 2024 dan mendukung tercapainya intervensi program penurunan stunting berdasarkan lokus yang telah ditetapkan, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah;
- Meningkatkan akses dan pelayanan KB yang merata dan berkualitas;
- Meningkatkan pemahaman remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga;
- Memperkuat advokasi dan KIE tentang KB dan Kesehatan Reproduksi di seluruh wilayah; Meningkatkan peran dan fungsi keluarga dalam pengasuhan anak dan perawatan lanjut usia;
- Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat dan tepat waktu;

Sub Kegiatan	:	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya
Target Semula	:	650 orang
Target Menjadi	:	414.961 Orang
Pagu Anggaran Semula	:	Rp. 1.045.245.637,-
Pagu Anggaran Menjadi	:	Rp. 1.156.504.904,-
Kelompok Sasaran	:	Masyarakat, calon akseptor KB dan Pasangan Usia Subur.
Bentuk Kegiatan	:	Kegiatan ini dilaksanakan dengan memberikan Pelayanan KB MOW dan MOP pada Pasangan Usia Subur warga Kota Surabaya yang dilaksanakan dengan melakukan pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan maupun melalui Bakti Sosial.
Materi Kegiatan	:	Pelayanan KB MOP dan MOW.
Frekuensi Pelaksanaan	:	12 bulan
Alasan Pemilihan Target	:	Sebagai upaya pengendalian jumlah penduduk dalam rangka mengendalikan kualitas penduduk melalui Keluarga Berencana, serta pengembangan dan peningkatan kualitas penduduk melalui perwujudan keluarga kecil yang berkualitas melalui pengendalian kelahiran dari Pasangan Usia Subur.

10. Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB memiliki satu sub kegiatan yaitu Pembinaan Terpadu Kampung KB dengan pagu anggaran Rp. 745.984.000,- outputnya terdiri dari :

Target : 31 Kecamatan

- Kelompok Sasaran : Pokja Kampung KB, Penyuluh KB/PLKB/PLKB Non ASN, PPKBD, Sub PPKBD, Kader Poktan dan Kader Rumah Data Kependudukan.
- Bentuk Kegiatan : Kegiatan operasional kelompok kerja di Kampung KB terdiri dari: Pemetaan masalah dan potensi, Penyusunan rencana kerja masyarakat, Persiapan pelaksanaan kegiatan, Pencatatan dan pelaporan dan Monitoring dan Evaluasi dengan mengacu pada pedoman Pengelolaan Kampung KB.
- Materi Kegiatan : Pengelolaan Program Bangga Kencana tingkat Kecamatan, operasional pengelolaan Rumah Data Kependudukan, Cakupan laporan program Bangga Kencana dalam SIGA, peningkatan partisipasi Keluarga/Keluarga dalam kegiatan poktan
- Frekuensi Pelaksanaan : 12 Bulan
- Alasan Pemilihan Target : Menyesuaikan dengan Juknis DAK Non Fisik
11. Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota memiliki dua sub kegiatan yaitu:
- Sub Kegiatan** : Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
- Target : 20 Kasus
- Pagu Anggaran : Rp. 87.600.000,-
- Kelompok Sasaran : Perempuan korban tindak kekerasan termasuk TPPO Warga Surabaya
- Bentuk Kegiatan : Pendampingan, Pembinaan dan Penanganan Permasalahan Perempuan.
- Pendampingan dan penanganan berupa Konseling, Medis, Psikososial, Hukum, Visum, Fasilitasi Rumah Aman (Shelter)
 - Pembinaan berupa Konseling, pelatihan kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual melalui ESQ
- Materi Kegiatan :
- Penanganan psikologis klien oleh konselor maupun psikolog,
 - Pemahaman konsep diri, bahaya napza, dan pemahaman kondisi psikologis, serta pembentukan karakter tangguh dengan kecerdasan intelektual (IQ), kecerdasan emosional (EQ) dan kecerdasan spiritual (SQ)
- Frekuensi Pelaksanaan :
- Pendampingan dan Penanganan 12 bulan dalam 1 tahun
 - Pembinaan 1 kali dalam 1 tahun
- Alasan Pemilihan Target : Perubahan perilaku klien menjadi lebih baik dan tertanganinya permasalahan tersebut sampai tuntas
- Sub Kegiatan** : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
- Target : 17 Kasus

Pagu Anggaran : Rp. 148.927.432,-
 Kelompok Sasaran : Perempuan korban tindak kekerasan termasuk TPPO
 Bentuk Kegiatan : Pendampingan dan pemberian layanan rujukan lanjutan klien, rapat koordinasi jejaring dan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan
 Materi Kegiatan : Advokasi dan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Termasuk TPPO, Isu Strategis permasalahan anak
 Frekuensi Pelaksanaan :

- Pendampingan dan Layanan Rujukan Lanjutan 12 bulan dalam 1 tahun
- Rapat Koordinasi Jejaring 1 kali dalam 1 tahun
- Sosialisasi Pencegahan Kekerasan 1 kali dalam 1 tahun

 Alasan Pemilihan Target : Jumlah kasus yang ditangani dan mendapat layanan rujukan lanjutan

12. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota memiliki satu sub kegiatan yaitu Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran semula Rp. 121.943.898,- menjadi Rp. 122.703.898,- outputnya terdiri dari :

Target : 926 Orang
 Kelompok Sasaran : Satgas Pusat Krisis Berbasis Masyarakat (PKBM)
 Bentuk Kegiatan : Advokasi Dan Sosialisasi Terkait Isu Permasalahan Dan Penanganan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Termasuk TPPO
 Materi Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan potensi yang ada pada satgas PKBM
 Frekuensi Pelaksanaan : 1 kali dalam 1 tahun
 Alasan Pemilihan Target : Jumlah Satgas PKBM yang dibina dan dikembangkan

13. Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga memiliki empat sub kegiatan yaitu:

Sub Kegiatan : Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)
 Target Semula : 100 orang
 Target Menjadi : 511 Kelompok
 Pagu Anggaran Semula : Rp. 990.001.817,-
 Pagu Anggaran Menjadi : Rp. 788.141.187,-
 Kelompok Sasaran : Tribina (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia)
 Bentuk Kegiatan : Advokasi dan pendampingan bagi Tribina sesuai permasalahan di masing-masing kelompok Bina.
 Materi Kegiatan : Assessment calon peserta (verifikasi data dan penelusuran minat).

	Advokasi terkait Ketahanan Keluarga di aspek sosial dan budaya (8 Fungsi Keluarga).
Frekuensi Pelaksanaan	: Pelaksanaan pendampingan bagi binaan selama 12 bulan.
Alasan Pemilihan Target	: Mendukung pencapaian iBangga
Sub Kegiatan	: Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
Target Semula	: 1 bangunan
Target Menjadi	: 38 Paket
Pagu Anggaran Semula	: Rp. 258.255.817,-
Pagu Anggaran Menjadi	: Rp. 379.508.650,-
Kelompok Sasaran	: Masyarakat/PUS
Bentuk Kegiatan	: Tender
Materi Kegiatan	: -
Frekuensi Pelaksanaan	: Target akumulasi di bulan Juli
Alasan Pemilihan Target	: Mendukung pencapaian Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
Sub Kegiatan	: Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
Target	: 31 Kecamatan
Pagu Anggaran	: Rp. 846.818.891,-
Kelompok Sasaran	: Kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga di 31 Kecamatan
Bentuk Kegiatan	: Orientasi Tenaga Lini Lapangan
Materi Kegiatan	: Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan Petugas Lini Lapangan
Frekuensi Pelaksanaan	: Dilakukan minimal 3 (tiga) x setahun
Alasan Pemilihan Target	: Mendukung pencapaian Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
Sub Kegiatan	: Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
Target Semula	: 15 lembaga
Target Menjadi	: 114 Kelompok
Pagu Anggaran Semula	: Rp. 565.898.886,-
Pagu Anggaran Menjadi	: Rp. 866.168.466,-
Kelompok Sasaran	: Kelompok UKM
Bentuk Kegiatan	: Fasilitasi pemasaran Pelaku Usaha. Pendampingan Inkubasi Usaha Mandiri bagi 23 orang binaan Inkubasi Usaha Mandiri Tahun 2020 dan 100

- orang binaan Inkubasi Usaha Mandiri Tahun 2021
- Materi Kegiatan : Assessment calon peserta (verifikasi data dan penelusuran minat)
Pembekalan softskill dan kewirausahaan (motivasi)
Pendampingan
- Frekuensi Pelaksanaan : 12 bulan
- Alasan Pemilihan Target : Meningkatkan pendapatan ekonomi Tribina.
14. Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga memiliki satu sub kegiatan yaitu Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja dengan pagu anggaran Rp. 470.337.167,- outputnya terdiri dari :
- Target : 417 Orang
- Kelompok Sasaran : Pusat Krisis Berbasis Masyarakat (PKBM) dan Satuan Tugas Perlindungan Anak
- Bentuk Kegiatan : Avokasi dan Sosialisasi
- Materi Kegiatan : Pengenalan Puspaga dan Parenting Umum
- Frekuensi Pelaksanaan : Dilakukan selama 12 bulan
- Alasan Pemilihan Target : Pusat Krisis Berbasis Masyarakat (PKBM) dan Satuan Tugas Perlindungan Anak
15. Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota memiliki satu sub kegiatan yaitu Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran Rp. 399.808.322,- outputnya terdiri dari :
- Target : 155 Keluarga
- Kelompok Sasaran : Keluarga yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi
- Bentuk Kegiatan : Pendampingan upaya peningkatan penghasilan keluarga
- Materi Kegiatan : Capacity Building upaya peningkatan ketrampilan di bidang ekonomi
- Frekuensi Pelaksanaan : 4 Kali
- Alasan Pemilihan Target : Pemberdayaan Ekonomi untuk peningkatan kualitas keluarga
16. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota memiliki satu sub kegiatan yaitu Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran Rp. 502.764.038,- outputnya terdiri dari :
- Target : 738 Orang
- Kelompok Sasaran : Organisasi perempuan
- Bentuk Kegiatan : Peningkatan kapasitas SDM organisasi perempuan
- Materi Kegiatan : Pelatihan Public Speaking, Pembentukan Konsep diri
- Frekuensi Pelaksanaan : 20 Kali
- Alasan Pemilihan Target : Organisasi perempuan adalah organisasi yang mempunyai kegiatan mengenai pemberdayaan

perempuan

17. Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota memiliki satu sub kegiatan yaitu Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran Rp. 500.669.707,- outputnya terdiri dari :

- Target : 2 Lembaga
- Kelompok Sasaran : Ruang PUSPAGA melayani konseling anak dan keluarga, Ruang ABK melayani konseling Anak Berkebutuhan Khusus dan edukasi terhadap orang tua / keluarganya untuk memberikan informasi kepada anaknya
- Bentuk Kegiatan : 1. Melakukan pelayanan konseling keluarga bagi Masyarakat Kota Surabaya
2. Melakukan psikoedukasi bagi anak, orang tua atau keluarga
3. Mengadakan kelas parenting baik parenting umum maupun parenting ABK dan mengadakan kelas pra nikah
4. Melakukan pendampingan melalui kegiatan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) dan kegiatan Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
5. Melakukan sosialisasi Puspaga ke Masyarakat Kota Surabaya melalui Kecamatan, Kelurahan, Sekolah dan instansi terkait
6. Mendukung kegiatan Pemerintah Kota Surabaya (Taman Baca Masyarakat (TBM), kegiatan Pertunjukan Rakyat (Pertura) dan Bakti Sosial
- Materi Kegiatan : 1. Konseling seputar anak, orang tua, dan keluarga
2. Sosialisasi tentang Puspaga
- Frekuensi Pelaksanaan : 12 bulan
- Alasan Pemilihan Target : Untuk mendukung kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

18. Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota memiliki satu sub kegiatan yaitu Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran semula Rp. 304.150.938 menjadi Rp. 307.487.397,- outputnya terdiri dari :

Target Semula : 2 Dokumen
 Target Menjadi : 72 Lembaga
 Kelompok Sasaran : Perangkat Daerah
 Bentuk Kegiatan : Pendampingan penyajian data terpilah dan penyusunan profil gender
 Materi Kegiatan : Sosialisasi aplikasi SIGAP dan perangkaan penyusunan profil gender
 Frekuensi Pelaksanaan : 2 Kali
 Alasan Pemilihan Target : Data terpilah yang lengkap, update dan valid menjadikan acuan perumusan kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai kesetaraan gender

19. Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota memiliki satu sub kegiatan yaitu Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran Rp. 531.887.567,- outputnya terdiri dari :

Target : 20 Kelurahan
 Kelompok Sasaran : RT, RW, Kampung, Kelurahan di Surabaya
 Bentuk Kegiatan : Fasilitasi dan pembinaan Kampung di setiap Kelurahan
 Materi Kegiatan : Kampung Ramah Perempuan dan Layak Anak
 Frekuensi Pelaksanaan : 1 kali dalam 1 tahun
 Alasan Pemilihan Target : Di Setiap Kelurahan Terdapat 1 Kampung Yang Harus Dibina Untuk Menuju Kampung Ramah Perempuan Dan Layak Anak

20. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota memiliki dua sub kegiatan yaitu:

Sub Kegiatan : Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
 Target Semula : 154 Kampung
 Target Menjadi : 2 Lembaga
 Pagu Anggaran Semula : Rp. 527.094.652,-
 Pagu Anggaran Menjadi : Rp. 1.077.692.246,-
 Kelompok Sasaran : Shelter Laki -laki : untuk anak warga kota Surabaya yang Berhadapan Hukum (ABH)
 Shelter perempuan : Untuk anak perempuan warga kota Surabaya yang menjadi korban kekerasan
 Bentuk Kegiatan : Pemeliharaan dan penyelenggaraan operasional untuk mendukung penanganan permasalahan perempuan dan anak
 Materi Kegiatan : Pembinaan Mental Spiritual, Pengawasan dan Monitoring, Perawatan dan Pemeliharaan gedung
 Frekuensi Pelaksanaan : 12 bulan dalam 1 tahun
 Alasan Pemilihan Target : Shelter Laki -laki : untuk anak warga kota Surabaya yang Berhadapan Hukum (ABH)
 Shelter perempuan : Untuk anak perempuan warga kota Surabaya yang menjadi korban kekerasan
Sub Kegiatan : Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia

		Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Target	:	431 Lembaga
Pagu Anggaran Semula	:	Rp. 774.331.591,-
Pagu Anggaran Menjadi	:	Rp. 737.198.646,-
Kelompok Sasaran	:	OPD, Kecamatan, Kelurahan, LSM, Dunia Usaha, Media Massa, Sekolah di Surabaya
Bentuk Kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi Gugus Tugas Kota Layak Anak • Sosialisasi untuk tingkat Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs) kegiatan Sosialisasi Dinamika Remaja
Materi Kegiatan	:	Pemenuhan Klaster KLA yang terdiri dari 24 indikator, serta sosialisasi ke sekolah dengan materi Konsep Diri, Internet Sehat, Perlindungan Diri, Kekerasan Fisik maupun isu permasalahan anak lainnya
Frekuensi Pelaksanaan	:	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi Gugus Tugas KLA 1 Kali dalam 1 tahun • Sosialisasi 1 Kali untuk 210 sekolah
Alasan Pemilihan Target	:	Menyesuaikan jumlah gugus tugas Kota Layak Anak serta Untuk menuju Surabaya Kota Layak Anak perlu melibatkan dukungan data dan kegiatan serta sinergitas antara OPD, Kecamatan, Kelurahan, LSM dan Sekolah

21. Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota memiliki dua sub kegiatan yaitu:

Sub Kegiatan	:	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Target Semula	:	200 kasus
Target Menjadi	:	150 Kasus
Pagu Anggaran Semula	:	Rp. 987.940.382,-
Pagu Anggaran Menjadi	:	Rp. 915.358.712,-
Kelompok Sasaran	:	Anak korban tindak kekerasan termasuk TPPO Warga Surabaya
Bentuk Kegiatan	:	Pendampingan, Pembinaan dan Penanganan Permasalahan Anak. <ul style="list-style-type: none"> • Pendampingan dan penanganan berupa Konseling, Medis, Psikososial, Hukum, Visum, Fasilitasi Rumah Aman (Shelter) • Pembinaan berupa Konseling, pelatihan kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual melalui ESQ
Materi Kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none"> • Penanganan psikologis klien oleh konselor maupun psikolog, • Pemahaman konsep diri, bahaya napza, dan pemahaman kondisi psikologis, serta

		pembentukan karakter tangguh dengan kecerdasan intelektual (IQ), kecerdasan emosional (EQ) dan kecerdasan spiritual (SQ)
Frekuensi Pelaksanaan	:	<ul style="list-style-type: none"> • Pendampingan dan Penanganan 12 bulan dalam 1 tahun • Pembinaan 1 kali dalam 1 tahun
Alasan Pemilihan Target	:	Perubahan perilaku klien menjadi lebih baik dan tertanganinya permasalahan tersebut sampai tuntas
Sub Kegiatan	:	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
Target Semula	:	2 lembaga
Target Menjadi	:	150 Kasus
Pagu Anggaran Semula	:	Rp. 1.281.621.745,-
Pagu Anggaran Menjadi	:	Rp. 300.714.894,-
Kelompok Sasaran	:	Anak korban tindak kekerasan termasuk TPPO
Bentuk Kegiatan	:	Pendampingan dan pemberian layanan rujukan lanjutan klien, rapat koordinasi jejairng dan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan
Materi Kegiatan	:	Advokasi dan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Termasuk TPPO, Isu Strategis permasalahan anak
Frekuensi Pelaksanaan	:	<ul style="list-style-type: none"> • Pendampingan dan Layanan Rujukan Lanjutan 12 bulan dalam 1 tahun • Rapat Koordinasi Jejaring 1 kali dalam 1 tahun • Sosialisasi Pencegahan Kekerasan 1 kali dalam 1 tahun
Alasan Pemilihan Target	:	Jumlah kasus yang ditangani dan mendapat layanan rujukan lanjutan

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Tabel T-C.31)

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100,00%	12.319.885.393	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi, sarana, dan prasarana perkantoran	100%	15.626.219.510	
			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100,00%							
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				11.749.118.462	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Ketepatan pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	11.749.118.462	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Surabaya	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	11.749.118.462	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Surabaya	Ketepatan penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	11.749.118.462	
						Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pelaksanaan administrasi umum serta ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100%	3.390.887.800	
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kantor Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan	Persentase penyediaan barang dan jasa perkantoran	100%	3.390.887.800	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Perlindungan Anak				
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				570.766.931	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Perangkat Daerah	100%	486.213.248	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kantor Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	570.766.931	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kantor Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	100%	486.213.248	
2	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		Persentase kelurahan yang responsif gender	41,56%	1.514.160.469	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		Persentase Perangkat Daerah yang responsif gender	100%	1.048.896.854	
			Persentase Perangkat Daerah Pemerintah Kota Surabaya yang telah menerapkan responsif gender dalam pelaksanaan kegiatan	100,00%							
	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota				671.550.041	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah perangkat daerah yang responsif gender	72 Lembaga	670.340.673	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	DP5A, Gedung Siola, Surabaya	Jumlah lembaga yang mengikuti Penguatan dan Pengembangan Jaringan Pengarusutamaan Gender	289 lembaga	671.550.041	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Gedung/Bangunan milik Pemkot Surabaya	Jumlah perangkat daerah yang responsif gender	72 Lembaga	670.340.673	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota				842.610.428	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah kegiatan advokasi dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan	9 Kali	378.556.181	
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Surabaya	Jumlah fasilitasi pembinaan organisasi perempuan	29 kali	842.610.428						
						Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kota Surabaya	Jumlah kegiatan advokasi dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan	9 Kali	378.556.181	
3						PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		Persentase SLTP / MTS, yang mendapatkan materi kependudukan	100%	323.738.419	
						Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		Jumlah SLTP / MTS, yang mendapatkan materi kependudukan	399 Sekolah	206.942.067	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Gedung/Bangunan milik Pemkot Surabaya	Jumlah SLTP / MTS, yang mendapatkan materi kependudukan	399 Sekolah	206.942.067	
						Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen pemetaan dalam rangka pengendalian penduduk	1 Dokumen	116.796.352	
						Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Gedung/Bangunan milik Pemkot Surabaya, Universitas	Jumlah dokumen pemetaan dalam rangka pengendalian penduduk	1 Dokumen	116.796.352	
4	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)	19,22%	10.544.741.903	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		Persentase pasangan usia subur yang berpartisipasi dalam penggunaan alat kontrasepsi	86.03 %	8.436.114.275	
			Persentase peserta KB baru	97,94%							
			Persentase peserta KB aktif	80,95%							
			Persentase peserta KB aktif yang drop out kontrasepsi	2,78%							
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal				7.949.098.266						

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPB sesuai Kearifan Budaya Lokal	31 Kecamatan dan Gedung milik Pemkot Surabaya	Jumlah orang Yang Mengikuti Penggerakan Program Kependudukan dan Masyarakat Peduli Keluarga Berencana	2208 orang	1.551.959.266						
	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPB	Kota Surabaya	Jumlah Sarana BKB Kit yang disediakan	38 unit	483.999.000						
	Pengendalian Program KKBPB	31 Kecamatan	Jumlah lembaga yang mendapat Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK Bidang Keluarga Berencana)	31 lembaga	5.913.140.000						
						Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		Jumlah pelaksanaan pertemuan pembinaan dan penyuluhan keluarga berencana	12 kali	2.307.479.302	
						Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPB untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Gedung/Bangunan milik Pemkot Surabaya	Jumlah pelaksanaan pertemuan pembinaan dan penyuluhan keluarga berencana	12 kali	1.388.788.798	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
							Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Gedung/Bangunan milik Pemkot Surabaya	Jumlah IMP yang berperan serta dalam pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana (Bangga Kencana)	1566 Orang	918.690.504	
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota				2.595.643.637		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah pasangan usia subur yang menggunakan alat kontrasepsi modern (mCPR)	416911 Orang	5.382.650.973	
							Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Fasilitas Kesehatan Pelayanan KB	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1950 Orang	2.685.013.738	
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	DP5A, ULP, BKKBN	jumlah sarana dan prasarana pelayanan KB yang disediakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana	52 unit	1.550.398.000		Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kantor DP5A	Jumlah sarana dan prasarana KB yang disediakan	2 Jenis	1.541.132.331	
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Rumah Sakit, Fasilitas Kesehatan, Puskesmas dan Bakti Sosial Kecamatan	Jumlah akseptor KB yang mendapatkan pelayanan KB	650 orang	1.045.245.637		Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Fasilitas Kesehatan Pelayanan KB	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan alat kontrasepsi	414961 Orang	1.156.504.904	
							Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat		Jumlah kampung KB yang dibina	31 Kecamatan	745.984.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB					
						Pembinaan Terpadu Kampung KB	Kampung KB yang telah dibentuk di 31 Kecamatan se Kota Surabaya	Jumlah kampung KB yang dibina	31 Kecamatan	745.984.000	
5	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88,00%	3.594.743.672						
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				3.594.743.672						
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kantor Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	3.594.743.672						
6	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		Persentase permasalahan perempuan dan anak yang ditangani	100,00%	121.943.898	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		Persentase lembaga / PKBM yang responsif terhadap perlindungan perempuan	32.25 %	359.231.330	
						Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah pengaduan dan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan	20 kasus	236.527.432	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
							Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Surabaya	Jumlah pengaduan yang diterima	20 kasus	87.600.000	
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Surabaya	Jumlah layanan rujukan lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan	17 kasus	148.927.432	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				121.943.898		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah peserta yang Mengikuti Capacity Building dalam layanan Perlindungan Perempuan	926 orang	122.703.898	
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Gedung Siola	Jumlah orang yang mengikuti Capacity Building	926 orang	121.943.898		Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Gedung/Bangunan milik Pemkot Surabaya	Jumlah peserta yang Mengikuti Capacity Building	926 orang	122.703.898	
7	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		Persentase kelompok Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, dan Bina Keluarga Lansia yang aktif	100,00%	3.218.569.225		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		Persentase keluarga dan mitra kerja yang mendapatkan pembinaan dan pendampingan Peningkatan Keluarga Sejahtera	45%	3.350.974.361	
			Persentase perempuan usia produktif dari hasil pendampingan	10,33%								

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			yang berproduksi								
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				3.218.569.225	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Jumlah keluarga yang mendapatkan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	511 Keluarga	2.880.637.194	
	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Surabaya	Jumlah orang yang difasilitasi dan mendapatkan pendampingan inkubasi usaha mandiri	100 orang	990.001.817	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Kota Surabaya	Jumlah kelompok tribina yang dibentuk dan diadvokasi terkait ketahanan dan kesejahteraan keluarga	511 kelompok	788.141.187	
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jl. Klakah Rejo Gang Sampurna No.21 Surabaya	Jumlah rumah kreatif yang dikelola selama 12 bulan	1 bangunan	258.255.817	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Surabaya	Jumlah sarana kelompok kegiatan yang disediakan	38 paket	379.508.650	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	di Kota Surabaya	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan keluarga sejahtera	1240 orang	489.386.012						
	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	di Kota Surabaya	Jumlah pendamping yang mengikuti pembinaan Bina Keluarga Balita/Bina Keluarga Remaja/Bina Keluarga Lansia yang didampingi	1350 orang	277.283.341						
						Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Surabaya	Penyediaan biaya operasional bagi kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga	31 kecamatan	846.818.891	
	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Mall Pelayanan Publik, Jln. Tunjungan No. 1-3, Lantai 2, Surabaya	Jumlah Puspaga yang diselenggarakan operasionalnya selama 12 bulan	2 lembaga	637.743.352						

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Surabaya, Luar Surabaya	Jumlah lembaga yang mendapat fasilitasi pengembangan usaha ekonomi	15 lembaga	565.898.886	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Surabaya, Luar Surabaya	Jumlah kelompok tribina yang mendapatkan promosi dan sosialisasi terkait ketahanan dan kesejahteraan keluarga	114 kelompok	866.168.466	
						Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Jumlah mitra kerja yang mendapat promosi dan sosialisasi ketahanan dan kesejahteraan keluarga	417 orang	470.337.167	
						Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Kota Surabaya	Jumlah mitra kerja yang mendapat promosi dan sosialisasi ketahanan dan kesejahteraan keluarga	417 orang	470.337.167	
8						PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		Persentase keluarga yang meningkat kualitasnya	20%	1.403.242.067	
						Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah keluarga yang meningkat kualitasnya dan responsif gender	155 Keluarga	399.808.322	
						Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Gedung/Bangunan milik Pemkot Surabaya	Jumlah keluarga yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi	155 Keluarga	399.808.322	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah peserta peningkatan kualitas keluarga	738 Orang	502.764.038	
						Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Gedung/Bangunan milik Pemkot Surabaya	Jumlah peserta peningkatan kualitas keluarga	738 Orang	502.764.038	
						Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah lembaga penyedia layanan keluarga yang dikelola selama 12 bulan	2 lembaga	500.669.707	
						Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	PUSPAGA dan RUANG ABK Gedung Ex-Siola Lt. 2, Jalan Tunjungan No. 1-3 Surabaya	Jumlah lembaga penyedia layanan keluarga yang dikelola selama 12 bulan	2 lembaga	500.669.707	
9	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		Persentase Perangkat Daerah Pemerintah Kota Surabaya yang telah menerapkan responsif gender dalam pelaksanaan kegiatan	100,00%	304.150.938	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		Persentase perangkat daerah yang menyediakan data gender dan anak	100%	307.487.397	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				304.150.938	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah perangkat daerah yang mempunyai data gender dan anak	72 Lembaga	307.487.397	
	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Surabaya	Jumlah dokumen yang disusun	2 dokumen	304.150.938	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Surabaya	Jumlah perangkat daerah yang mempunyai data gender dan anak	72 Lembaga	307.487.397	
10	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		Persentase kelurahan ramah anak	100,00%	1.301.426.243	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		Persentase Kelurahan Layak Anak	47.4 %	2.346.778.459	
						Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Kelurahan Layak Anak yang dibina dan dikembangkan menjadi Tingkat Madya	20 Kelurahan	531.887.567	
						Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Surabaya	Jumlah Kelurahan Layak Anak yang dibina dan dikembangkan menjadi Tingkat Madya	20 Kelurahan	531.887.567	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1.301.426.243	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah lembaga yang dibina dan didampingi dalam pencapaian indikator Kota Layak Anak	431 Lembaga	1.814.890.892	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	154 Kelurahan yang ada di kota surabaya	Jumlah kampung Kampunge Arek Suroboyo yang dibina dan dikembangkan	154 kampung	527.094.652	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Shelter Laki-Laki : Jl. Gayung Kebonsari VIII/58 Shelter perempuan :Jl. Gayungsari Barat XII GA-GB 15	Jumlah Shelter yang diselenggarakan Operasionalnya Selama 12 Bulan	2 Lembaga	1.077.692.246	
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Surabaya	Jumlah lembaga yang difasilitasi dalam pencapaian indikator kota layak anak	431 lembaga	774.331.591	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Surabaya	Jumlah lembaga yang dibina dan didampingi dalam pencapaian indikator Kota Layak Anak	431 Lembaga	737.198.646	
11	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		Persentase efektivitas pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (PPTP2A)	74,98%	2.777.377.127	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		Persentase lembaga / PKBM yang responsif terhadap perlindungan khusus anak	32.25 %	1.216.073.606	
			Persentase efektivitas pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (PPTP2A)	74,98%				Persentase respon terhadap permasalahan yang terjadi pada perempuan dan anak korban kekerasan dan trafficking ≤ 1 x 24 jam	100%		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				2.777.377.127	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah pengaduan dan layanan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus	150 kasus	1.216.073.606	
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Surabaya	Jumlah Pendampingan dan Pembinaan Penanganan Permasalahan Perempuan Dan Anak	200 kasus	987.940.382	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Surabaya	Jumlah pengaduan yang diterima	150 kasus	915.358.712	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Shelter Laki-Laki : Jl. Gayung Kebonsari VIII/58 Shelter perempuan :Jl. Gayungsari Barat XII GA-GB 15	Jumlah shelter yang diselenggarakan operasionalnya selama 12 bulan	2 lembaga	1.281.621.745	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Surabaya	Jumlah layanan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus	150 kasus	300.714.894	
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Surabaya	Jumlah orang yang mendapatkan layanan perlindungan perempuan dan anak	100 Orang	507.815.000						
	TOTAL				35.696.998.868	TOTAL				34.418.756.278	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

2.5.1. Proses Perolehan Usulan Program/Kegiatan dari Forum Perangkat Daerah

Forum Perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Bappeko. Forum Perangkat Daerah dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Pembahasan dengan pemangku kepentingan bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah.

Forum perangkat Daerah yang sudah dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya menghasilkan saran dan masukan pada penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan serta penyelesaian permasalahan yang mendesak yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak . Masukan yang ada tidak berupa usulan program atau kegiatan, akan tetapi penajaman terhadap bentuk pelaksanaan dan sasaran program dan kegiatan yang telah disusun pada rancangan awal Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak . Saran dan Masukan pada Forum Perangkat Daerah diuraikan sebagai berikut:

1. Dr. Tri Soesantari, Dra, M.Si (Narasumber IPG) saran yang diberikan :
 - 1) RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026 belum ada sehingga seluruh program dan kegiatan mengacu pada isu-isu prioritas Kota Surabaya.
 - 2) Diperlukan analisis data gender agar output dari outcome terlihat secara akuntable.
 - 3) Persoalan perempuan tidak hanya diselesaikan oleh DP5A, tapi diselesaikan juga oleh OPD terkait sehingga perlu adanya analisa data yang terintegrasi.
 - 4) Permasalahan Gender pada pandemi COVID-19, kondisi masyarakat yang multikultural, dan budaya patriarki yang masih kuat, harus mendapat penanganan yang intensif.
 - 5) Kota Surabaya telah mencapai 93,6% IPG sedangkan nasional memiliki nilai IPG sebesar 96%. Sehingga diperlukan peningkatan kinerja Pemerintah Kota Surabaya untuk menutup kesenjangan tersebut.
 - 6) Diperlukan pengetahuan tentang Keluarga Berencana (KB) tidak hanya pada perempuan tapi juga laki-laki. Pengetahuan KB secara merata dapat

menangani masalah stunting di tingkat keluarga. Salah satunya dengan cara gerakan suami mengurangi konsumsi rokok dengan sudut pandang kesehatan dan ekonomi.

2. Sofyan Rizalanda (BKKBN Provinsi Jawa Timur) saran yang diberikan :

- 1) Di tahun 2022 nanti akan ada Survey di seluruh Indonesia yg disebut SDKI (Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia), yang bertujuan untuk mengevaluasi kepesertaan KB agar jumlah kepesertaan KB terbukti secara valid.
- 2) Renstra BKKBN Provinsi Jawa Timur memiliki 3 target utama antara lain (TFR, MCPR, unmet need), berdasarkan target tersebut maka di tahun 2021 direncanakan pendataan keluarga dengan tujuan mengetahui pasangan usia subur yang menunda punya anak tetapi tidak menggunakan alat kontrasepsi.
- 3) Koordinator penanganan stunting menerapkan target di tahun 2024 sebesar 14%, saat ini (tahun 2020) stunting masih sebesar 24%. Sehingga diperlukan sinkronisasi program penurunan stunting dan pembuatan Road Map Strategi penanganan stunting.
- 4) Tahun 2022 DP5A masih mendapat anggaran DAK Fisik & BOKB, namun belum bisa menggunakan sistem bottom up tetapi up to down maka pemerintah kota khususnya OPD yang bertanggungjawab harus secara maksimal menggunakan anggaran tersebut.
- 5) Perlu dibangun Balai Penyuluhan KB di tingkat Kecamatan dengan cara memanfaatkan bangunan milik Pemerintah Kota untuk dijadikan sebagai balai penyuluhan. BKKBN akan mendukung dan mengajukan ke pusat untuk penganggaran dan renovasi balai dan diharapkan di Kota Surabaya bisa merealisasikan hal tersebut.

3. Dr. Lutfi Agus Salim, SKM, MSi (Koalisi Kependudukan) saran yang diberikan :

- 1) Unmet Need di tahun 2020 belum tercapai. Target capaian adalah 9,1, tapi realisasinya 11.
- 2) Dropout KB, terjadi peningkatan yang signifikan dari 0,46% di tahun 2019 menjadi 8,3% di tahun 2020.
- 3) Pengendalian kuantitas untuk KB.

- 4) Yang harus diwaspadai, pada masa pandemi Covid-19 banyak warga Surabaya yg kembali ke daerah masing-masing. Biasanya rata-rata jumlah penduduk Surabaya adalah 3,1 juta penduduk, sedangkan hasil Sensus 2020 adalah 2,8 juta penduduk. Secara indikator kependudukan berhasil, namun hal ini bersifat semu, karena penurunan jumlah penduduk terjadi bukan karena keberhasilan pengendalian penduduk tetapi karena kondisi pandemi.
 - 5) Target baru yang perlu difokuskan saat ini adalah program Stunting yang juga berpengaruh pada kualitas kependudukan dan pemberdayaan perempuan.
4. Atiyun Indhira (Dinas Sosial Kota Surabaya) saran yang diberikan :
 - 1) Diharapkan seluruh PD di Kota Surabaya dapat mengintegrasikan data-data yang dibutuhkan dalam pencapaian program.
 - 2) Diperlukan sinergi dalam pemutakhiran data seperti MBR dan UPPKS agar dapat disinkronkan dengan data di Kementerian Sosial.
 5. Maria Rosa Sari (Wahana Visi Indonesia) saran yang diberikan :
 - 1) Keterbatasan Wahana Visi adalah hanya mendampingi 5 wilayah namun tetap berupaya untuk memaksimalkan program-program pendampingan untuk anak.
 - 2) Monitoring secara berkelanjutan di wilayah-wilayah dampingan.
 - 3) Bersinergi menjadi tim dlm program KP KAS khususnya diwilayah dampingan Wahana Visi.
 6. Rini Pudjiwati, SE., M.Si (Perwakilan PKB Wilayah Barat) saran yang diberikan :
 - 1) Diperlukan Balai Penyuluhan KB agar Penyuluh KB terfasilitasi dalam melakukan sosialisasi maupun koordinasi.
 - 2) Upaya penurunan angka stunting telah dilakukan dengan melakukan penyuluhan tidak hanya di wilayah kerja tetapi juga kepada siapapun yang membutuhkan secara personal.
 - 3) Semua kegiatan pendidikan dilakukan melalui pembelajaran daring maka kepada Ibu PKK dan Ibu Rumah Tangga dapat diberikan dampingan cara pembelajaran daring dan pendalaman media sosial yang membawa dampak positif bagi anak-anak.

- 4) Menyetujui Gerakan Suami Mengurangi Merokok terutama saat bersama anak-anaknya.
7. Dra. Indah Rahajuningsih (Perwakilan PKB Wilayah Timur) saran yang diberikan :
 - 1) Butuh ada Paguyupan UPPKA di tingkat Kota yang terdiri dari 31 ketua.
 - 2) Adanya regenerasi kader IMP dengan pembatasan usia kader IMP agar kinerja lebih efektif dan efisien.
 - 3) Perlu adanya fasilitas pembinaan PIK Remaja.
8. Dra. Emi Saraswati (Perwakilan PKB Wilayah Pusat) saran yang diberikan :
 - 1) Perlu adanya peran aktif dari semua pihak, terutama mulai lingkup RT - RW dalam pengawasan perilaku anak untuk menghindari hal yang tidak diinginkan.
9. Suyitno, SH. (Perwakilan PKB Wilayah Selatan) saran yang diberikan :
 - 1) Untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga terutama bagi yg mau melakukan pernikahan ada mitra kerja yaitu KUA yg dulu di kenal istilah BP4 bersama dengan Penyuluh KB atau kader KB memberikan penyuluhan.

2.5.2. Proses Perolehan Usulan Program/Kegiatan dari Musrenbang

Musrenbang RKPD kota dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, Klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD Bappeko kepada kepala daerah untuk memperoleh persetujuan dibahas dalam musrenbang RKPD kota. Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan mencakup:

1. Prioritas dan sasaran pembangunan daerah dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah provinsi;
2. Usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah pada musrenbang RKPD kota di kecamatan dan/atau sebelum musrenbang RKPD kabupaten/kota dilaksanakan;
3. Indikator kinerja program dan kegiatan prioritas daerah;
4. Prioritas pembangunan daerah serta program dan kegiatan prioritas daerah;
5. Sinergi dengan RKP dan RKPD provinsi.

Musrenbang RKPD kabupaten/kota dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh BAPPEKO. Pimpinan atau anggota DPRD kabupaten/kota, pejabat dari kementerian/lembaga ditingkat pusat, pejabat PD provinsi dan pejabat PD

kabupaten/kota atau dari unsur lain terkait, dapat diundang menjadi narasumber musrenbang RKPD kabupaten/kota. Hasil musrenbang RKPD kabupaten/kota dirumuskan ke dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang.

2.5.3. Kesesuaian Usulan Musrenbang dengan Tugas, Fungsi, dan Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai bagian dari Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat khusus, yaitu di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Mulai Tahun 2017 Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak boleh melaksanakan pelatihan keterampilan, maka usulan kegiatan masyarakat yang masuk akan diarahkan atau disinergikan dengan kegiatan pahlawan ekonomi.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021 fokus pada pemulihan sosial ekonomi untuk mengejar pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang diterjemahkan dalam 7 Prioritas Nasional sebagai berikut :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan (Polhukhankam), dan Transformasi Pelayanan Publik.

Tema dan sasaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021 disusun dengan mempertimbangkan sasaran RPJMN 2020-2024, hasil evaluasi pembangunan dan anggaran tahun 2019 serta kebijakan pembangunan tahun 2020 yang kemudian diarahkan kepada proses pemulihan pembangunan nasional pascapandemi Covid-19. Tema RKP 2021 yaitu “Mempercepat pemulihan Ekonomi Dan Reformasi Sosial”.

Sedangkan indikator Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021 sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi dengan target 4,5-5,5 (%)
2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dengan target 7,7-9,1 (%)
3. Tingkat Kemiskinan dengan target 9,2-9,7 (%)
4. Rasio Gini dengan target 0,377-0,379
5. Indeks Pembangunan Manusia dengan target 72,78-72,95
6. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) 23,55-24,05 (%)

Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai bagian dari Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan Keluarga Berencana, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat khusus, yaitu di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan Agenda Pembangunan RKP 2021 yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah pada prioritas nasional ke-3 yaitu Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan Strategis Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kebutuhan Dasar Lainnya;
2. Meningkatnya Pengarus Utamaan Gender, Pemberdayaan serta Perlindungan Perempuan dan Anak.

3.2.1 Sasaran Renja Perangkat Daerah

Untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dan masing-masing tujuan ditetapkan satu atau beberapa sasaran strategis yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Tujuan : Meningkatnya Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kebutuhan Dasar Lainnya, memiliki sasaran:
 - a. Mewujudkan keluarga yang berkualitas;
 - b. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk.

2. Tujuan : Meningkatkan Pengarus Utamaan Gender, Pemberdayaan serta Perlindungan Perempuan dan Anak, memiliki sasaran :
 - a. Meningkatnya upaya perlindungan perempuan dan anak;
 - b. Meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan;
 - c. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah pada Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Faktor-Faktor yang Menjadi Pertimbangan dalam Penetapan Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam penetapan program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah:

1. Program dan kegiatan harus selaras dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang maupun Forum Perangkat Daerah.
2. Program dan kegiatan harus selaras dengan program dan kegiatan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah Kota Surabaya.
3. Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak pasti akan terjadi setiap tahun, tindak kekerasan yang terjadi umumnya adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), non KDRT dan *trafficking* (perdagangan orang). Pemerintah Kota Surabaya telah menciptakan sistem untuk melakukan fasilitasi terhadap semua kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
4. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan menyebutkan salah satu program penanggulangan kemiskinan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui pemberdayaan masyarakat.
5. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) sebagai hasil program pemberdayaan masyarakat dengan melakukan usaha ekonomi produktif merupakan salah satu solusi untuk memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat dalam menghadapi meningkatnya biaya kebutuhan hidup.

Selain itu, Isu-isu penting/Strategis pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga menjadi Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam penetapan program dan kegiatan tahun 2022. Isu-isu dijabarkan sebagai berikut:

1. Adanya kewenangan untuk melaksanakan program pemberdayaan, pembinaan kepada masyarakat serta pelatihan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

2. Adanya kewenangan untuk melaksanakan program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sehingga terwujud keluarga yang berkualitas.
3. Keterlibatan masyarakat dan lembaga berbasis masyarakat yang menunjang pelaksanaan program.
4. Adanya kewenangan untuk melaksanakan program perlindungan perempuan dan anak sehingga permasalahan perempuan dan anak tertangani dengan baik

4.2 Garis Besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Penyelenggaraan program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan berdasarkan urusan pemerintahan daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dimana sebagian menjadi urusan yang sesuai dengan menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pada tahun 2022, rencana program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang disusun berdasarkan pada perumusan tujuan dan sasaran terdiri dari 10 Program, 21 Kegiatan, dan 30 Sub Kegiatan.

4.3 Program dan Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya menyusun Program dan kegiatan untuk tahun 2022 yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

2. Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
 - Kegiatan : Pelembagaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan : Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
 - Kegiatan : Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan : Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
3. Program Perlindungan Perempuan
 - Kegiatan : Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan : Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan : Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
4. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
 - Kegiatan : Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan : Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- Kegiatan : Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
5. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
- Kegiatan : Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan : Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota
6. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
- Kegiatan : Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan : Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
- Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan : Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan : Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
7. Program Perlindungan Khusus Anak
- Kegiatan : Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan : Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota

8. Program Pengendalian Penduduk

Kegiatan : Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk

Sub Kegiatan : Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal

Kegiatan : Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB

9. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Kegiatan : Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)

Sub Kegiatan : Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)

Sub Kegiatan : Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)

Kegiatan : Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB

Sub Kegiatan : Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya

Kegiatan : Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB

Sub Kegiatan : Pembinaan Terpadu Kampung KB

10. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Kegiatan : Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Sub Kegiatan : Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)

Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

Sub Kegiatan : Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

Sub Kegiatan : Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

Kegiatan : Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Sub Kegiatan : Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan diuraikan secara detail pada Tabel T-C 33 Tentang Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 Dan Prakiraan Maju Tahun 2023.

Tabel T-C.33
 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023
 Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 Kota Surabaya

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi, sarana, dan prasarana perkantoran		100%	Rp 15.626.219.510			100%	Rp 16.615.168.430
2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
2.08.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Ketepatan penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Surabaya	100 %	Rp 11.749.118.462			100 %	Rp 12.042.846.424
2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.08.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyediaan barang dan jasa perkantoran	Kantor Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	100 %	Rp 3.390.887.800			100 %	Rp 4.069.711.526
2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
2.08.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Kantor Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	100 %	Rp 486.213.248			100 %	Rp 502.610.480
2.08.02	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Perangkat Daerah yang responsif gender		100%	Rp 1.048.896.854			100%	Rp 1.098.478.828
2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota								
2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah perangkat daerah yang responsif gender	Gedung/ Bangunan milik Pemkot Surabaya	72 Lembaga	Rp 670.340.673			72 Lembaga	Rp 691.241.349

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.08.02.2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota							
2.08.02.2.02.02		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah kegiatan advokasi dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan	Kota Surabaya	9 Kali	Rp 378.556.181		9 Kali	Rp 407.237.479
2.08.03		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase lembaga / PKBM yang responsif terhadap perlindungan perempuan		32.25 %	Rp 359.231.330		32.25 %	Rp 633.632.491
2.08.03.2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota							
2.08.03.2.02.01		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan yang diterima	Kota Surabaya	20 kasus	Rp 87.600.000		20 kasus	Rp 87.600.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (*)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2.08.03.2.02.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah layanan rujukan lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan	Kota Surabaya	17 kasus	Rp 148.927.432			17 kasus	Rp 152.207.209
2.08.03.2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
2.08.03.2.03.04		Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang Mengikuti Capacity Building	Gedung/ Bangunan milik Pemkot Surabaya	926 orang	Rp 122.703.898			926 orang	Rp 393.825.282
2.08.04		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase keluarga yang meningkat kualitasnya		20%	Rp 1.403.242.067			20%	Rp 1.486.799.158
2.08.04.2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (*)
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10
2.08.04.2.01.03				Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi	Gedung/ Bangunan milik Pemkot Surabaya	155 Keluarga	Rp 399.808.322			155 Keluarga	Rp 425.276.171
2.08.04.2.02				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota								
2.08.04.2.02.02				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta peningkatan kualitas keluarga	Gedung/ Bangunan milik Pemkot Surabaya	738 Orang	Rp 502.764.038			738 Orang	Rp 507.084.390
2.08.04.2.03				Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota								

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.08.04.2.03.01		Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan keluarga yang dikelola selama 12 bulan	PUSPAGA dan RUANG ABK Gedung Ex-Siola Lt. 2, Jalan Tunjungan No. 1-3 Surabaya	2 lembaga	Rp 500.669.707		2 lembaga	Rp 554.438.597
2.08.05		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase perangkat daerah yang menyediakan data gender dan anak		100%	Rp 307.487.397		100%	Rp 403.948.926
2.08.05.2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
2.08.05.2.01.01		Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang mempunyai data gender dan anak	Kota Surabaya	72 Lembaga	Rp 307.487.397		72 Lembaga	Rp 403.948.926
2.08.06		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Kelurahan Layak Anak		47.4 %	Rp 2.346.778.459		47.4 %	Rp 3.347.907.618
2.08.06.2.01		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota							

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (*)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2.08.06.2.01.01		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kelurahan Layak Anak yang dibina dan dikembangkan menjadi Tingkat Madya	Kota Surabaya	20 Kelurahan	Rp 531.887.567			20 Kelurahan	Rp 741.395.054
2.08.06.2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota								
2.08.06.2.02.01		Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Shelter yang diselenggarakan Operasionalnya Selama 12 Bulan	Shelter Laki-Laki : Jl. Gayung Kebonsari VIII/58 Shelter perempuan :Jl. Gayungsari Barat XII GA-GB 15	2 Lembaga	Rp 1.077.692.246			2 Lembaga	Rp 1.362.710.966
2.08.06.2.02.03		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang dibina dan didampingi dalam pencapaian indikator Kota Layak Anak	Kota Surabaya	431 Lembaga	Rp 737.198.646			431 Lembaga	Rp 1.243.801.598

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase lembaga / PKBM yang responsif terhadap perlindungan khusus anak		32.25 %	Rp 1.216.073.606			32.25 %	Rp 1.597.358.254
		Persentase respon terhadap permasalahan yang terjadi pada perempuan dan anak korban kekerasan dan trafficking ≤ 1 x 24 jam		100%				100%	
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
2.08.07.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan yang diterima	Kota Surabaya	150 kasus	Rp 915.358.712			150 kasus	Rp 1.218.471.532
2.08.07.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah layanan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus	Kota Surabaya	150 kasus	Rp 300.714.894			150 kasus	Rp 378.886.722

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase SLTP / MTS,yang mendapatkan materi kependudukan		100%	Rp 323.738.419			100%	Rp 341.389.703
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk								
2.14.02.2.01.09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah SLTP / MTS, yang mendapatkan materi kependudukan	Gedung/ Bangunan milik Pemkot Surabaya	399 Sekolah	Rp 206.942.067			399 Sekolah	Rp 210.011.937
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota								

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah dokumen pemetaan dalam rangka pengendalian penduduk	Gedung/ Bangunan milik Pemkot Surabaya, Universitas	1 Dokumen	Rp 116.796.352			1 Dokumen	Rp 131.377.766
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase pasangan usia subur yang berpartisipasi dalam penggunaan alat kontrasepsi		86.03 %	Rp 8.436.114.275			86.03 %	Rp 9.594.650.079
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)								
2.14.03.2.02.03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah pelaksanaan pertemuan pembinaan dan penyuluhan keluarga berencana	Gedung/ Bangunan milik Pemkot Surabaya	12 kali	Rp 1.388.788.798			12 kali	Rp 1.585.573.754
2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah IMP yang berperan serta dalam pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana (Bangga Kencana)	Gedung/ Bangunan milik Pemkot Surabaya	1566 Orang	Rp 918.690.504			1566 Orang	Rp 985.256.279
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian								

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (*)
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10
				Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota							
2.14.03.2.03.03				Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Fasilitas Kesehatan Pelayanan KB	1950 Orang	Rp 2.685.013.738		1950 Orang	Rp 2.710.144.957
2.14.03.2.03.06				Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah sarana dan prasarana KB yang disediakan	Kantor DP5A	2 Jenis	Rp 1.541.132.331		2 Jenis	Rp 1.587.366.297
2.14.03.2.03.08				Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan alat kontrasepsi	Fasilitas Kesehatan Pelayanan KB	414961 Orang	Rp 1.156.504.904		414961 Orang	Rp 1.361.700.392
2.14.03.2.04				Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB							

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.14.03.2.04.04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah kampung KB yang dibina	Kampung KB yang telah dibentuk di 31 Kecamatan se Kota Surabaya	31 Kecamatan	Rp 745.984.000			31 Kecamatan	Rp 1.364.608.400
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase keluarga dan mitra kerja yang mendapatkan pembinaan dan pendampingan Peningkatan Keluarga Sejahtera		45%	Rp 3.350.974.361			45%	Rp 3.699.785.777
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga								
2.14.04.2.01.01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah kelompok tribina yang dibentuk dan diadvokasi terkait ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Kota Surabaya	511 kelompok	Rp 788.141.187			511 kelompok	Rp 881.685.061

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.14.04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah sarana kelompok kegiatan yang disediakan	Kota Surabaya	38 paket	Rp 379.508.650			38 paket	Rp 390.893.909
2.14.04.2.01.05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Penyediaan biaya operasional bagi kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Kota Surabaya	31 kecamatan	Rp 846.818.891			31 kecamatan	Rp 854.640.451
2.14.04.2.01.07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kelompok tribina yang mendapatkan promosi dan sosialisasi terkait ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Surabaya, Luar Surabaya	114 kelompok	Rp 866.168.466			114 kelompok	Rp 1.056.231.973

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.14.04.2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga							
2.14.04.2.02.04		Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah mitra kerja yang mendapat promosi dan sosialisasi ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Kota Surabaya	417 orang	Rp 470.337.167		417 orang	Rp 516.334.383
					Rp 34.418.756.278				Rp 38.819.119.264

BAB V PENUTUP

Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2022 merupakan rencana pelaksanaan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada tahun 2022 yang dalam penyusunannya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2022.

Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2022 disusun melalui kaidah perencanaan strategis dan telah memperhatikan keselarasan dengan perencanaan di atasnya, untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang terpadu dan optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel sesuai tugas dan fungsinya.

Surabaya,
Plt. KEPALA DINAS,


ANTIEK SUGIHARTI M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196709101996022001